

**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Nuryana Nurul Hasanah

Nomor Mahasiswa : 17313004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2020

**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nuryana Nurul Hasanah

Nomor Mahasiswa : 17313004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

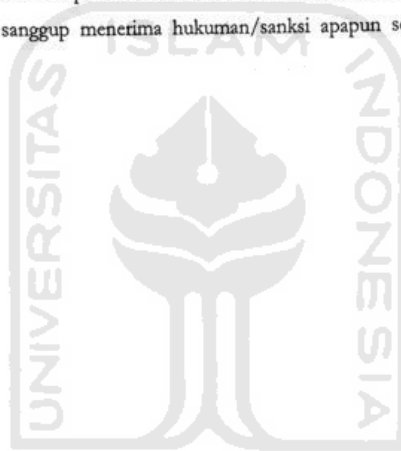
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2020

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penelitian skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



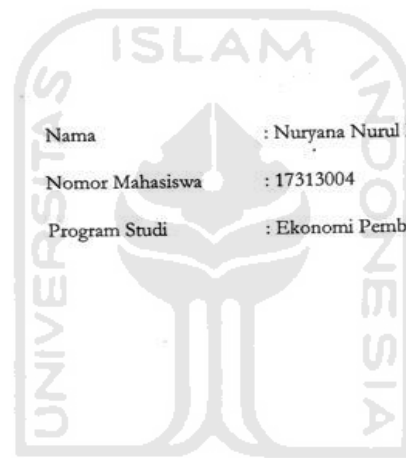
Yogyakarta, 13 November 2020

Penulis,


Nuryana Nurul Hasanah

PENGESAHAN

PENGESAHAN
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah
Istimewa Yogyakarta



Nama : Nuryana Nurul Hasanah
Nomor Mahasiswa : 17313004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 12 November 2020

telah disetujui dan disahkan oleh

ae nyan

Dosen Pembimbing,



Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI
KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **NURYANA NURUL HASANAH**

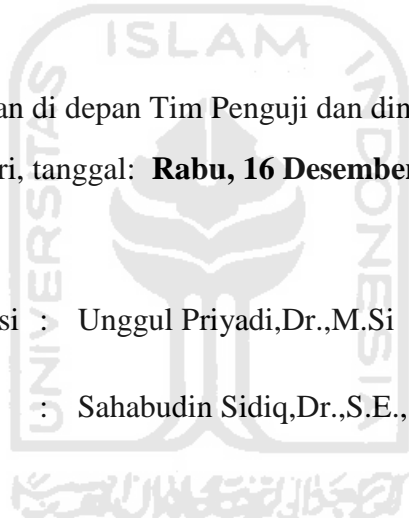
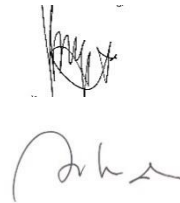
Nomor Mahasiswa : **17313004**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 16 Desember 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., M.Si

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku”

(Q.S Taha ayat 25-28)

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, ibu dan bapak yang telah berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan saya hingga jenjang sarjana. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa membuat ibu dan bapak bangga. Terimakasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan untuk saya. Adikku yang selalu memberi doa dan dukungan kepada saya. Teman-teman saya, yang telah memberikan hal positif untuk saya dan telah memberikan bantuan ketika saya membutuhkan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Bersama dengan terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena hal tersebut, penulis dalam kesempatan ini mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pembuka Rahmat dan Maha Penolong.
2. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Saryana dan Ibu Heni Nurhayati yang telah bekerja keras dapat menyekolahkan penulis hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
3. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Halimatusa'diyah, Reyna Surya Maulidina, dan Evania Friza Azhar. Terimakasih atas bantuan selama bimbingan tugas akhir.
5. Suci Brilianti Hermanto dan Putri Dwiawani. Terimakasih telah menjadi teman yang memberikan hal positif selama berkuliah di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang diperlukan untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Apabila terdapat kesalahan materi yang terdapat dalam tugas akhir ini, penulis mohon maaf. Dan penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 November 2020



Nuryana Nurul Hasanah

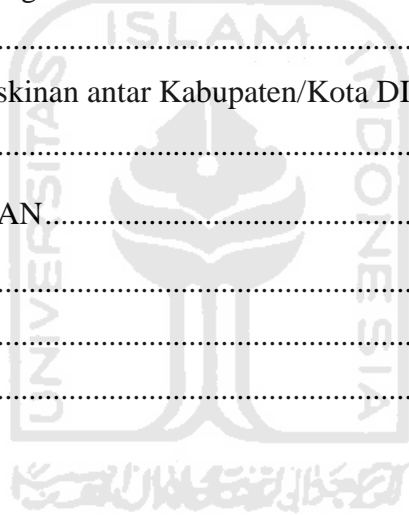


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15

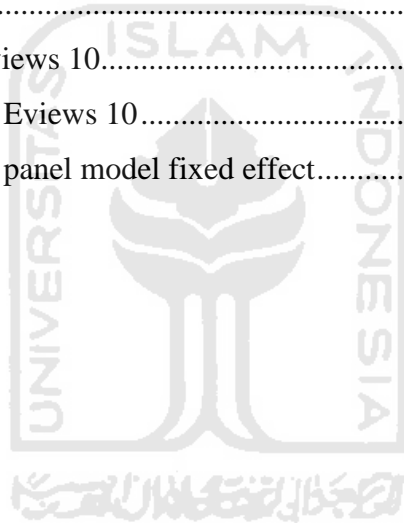
2.1	Kajian Pustaka	15
1.6	Landasan teori	19
1.6.1	Kemiskinan	19
2.2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
2.2.3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	27
2.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	31
2.2.5	Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	33
2.3	Kerangka Pemikiran	36
2.4	Formulasi Hipotesis.....	38
2.5	Hipotesis Operasional.....	39
2.5.1	Hipotesis operasional uji simultan	39
2.5.2	Hipotesis operasional uji parsial	40
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis dan sumber data.....	41
3.2	Definisi Operasional Variabel	41
3.3	Variabel terikat (dependen)	42
3.4	Variabel bebas (independen)	42
3.5	Metode Analisis.....	43
3.6	Pendekatan Model Regresi Data Panel	45
3.6.1	Model Common effect	45
3.6.2	Model Fixed Effect	45
3.6.3	Model random effect.....	46
3.7	Pemilihan model yang tepat dalam analisis regresi data panel	47
3.7.1	Uji Chow (Uji F).....	47
3.7.2	Uji LM.....	49
3.7.3	Uji Hausman	50
3.6	Uji Statistik.....	51
3.6.1	Koefisien determinasi (R^2).....	51

3.6.2	Uji parsial (Uji T).....	52
3.6.3	Uji bersama-sama (Uji F).....	53
BAB IV	55
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Deskriptif Data	55
4.2	Hasil Analisis Penelitian	65
4.2.1	Hasil regresi data panel ketiga model	65
4.2.2	Pemilihan model yang tepat	66
4.2.3	Uji statistik dengan Model Fixed effect	68
4.2.4	Pembahasan.....	71
4.2.5	Analisis kemiskinan antar Kabupaten/Kota DI Yogyakarta	76
BAB V	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82



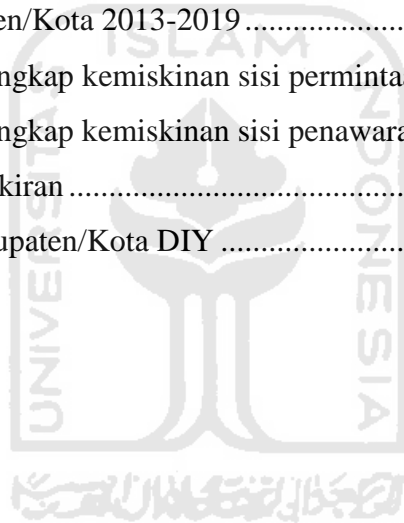
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas kemiskinan nasional.	2
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.3 Statistik deskriptif	56
Tabel 4.4 Hasil regresi data panel dengan model common effect, fixed effect, dan random effect	65
Tabel 4.5 Hasil uji chow Eviews 10.....	66
Tabel 4.6 hasil uji hausman Eviews 10.....	68
Tabel 4.7 Hasil regresi data panel model fixed effect.....	68



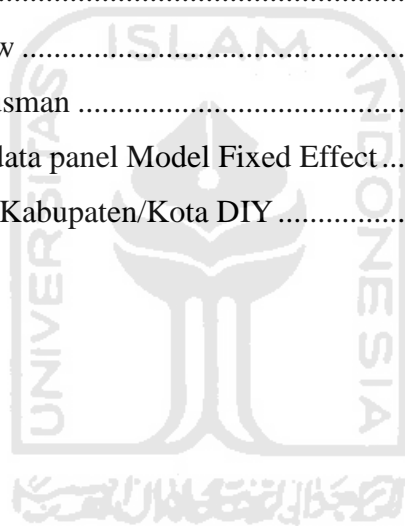
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Presentase kemiskinan Kabupaten/Kota DIY 2019	5
Gambar 1.2 Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota DIY 2010-2019	6
Gambar 1.3 IPM Kabupaten/Kota DIY 2010-2019	7
Gambar 1.4 RLS Kabupaten/Kota DIY 2010-2019	8
Gambar 1.5 TPT Kabupaten/Kota 2017-2019	10
Gambar 1.6 UMK Kabupaten/Kota 2013-2019	11
Gambar 2.7 Lingkaran perangkap kemiskinan sisi permintaan	21
Gambar 2.8 Lingkaran perangkap kemiskinan sisi penawaran	22
Gambar 2.9 Kerangka pemikiran	37
Gambar 4.10 Intercept Kabupaten/Kota DIY	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran I Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota DIY (Ribu Jiwa)	86
Lampiran II IPM menurut Kabupaten/Kota DIY (Persen)	87
Lampiran III RLS menurut Kabupaten/Kota DIY (Tahun)	88
Lampiran IV TPT menurut Kabupaten/Kota DIY (Persen)	89
Lampiran V UMK menurut Kabupaten/Kota DIY (Rupiah/bulan)	90
Lampiran VI Jumlah penduduk miskin, IPM, RLS, TPT, dan UMP menurut Provinsi DIY	91
Lampiran VII Hasil uji chow	92
Lampiran VIII Hasil uji hausman	93
Lampiran IX Hasil regresi data panel Model Fixed Effect	94
Lampiran X Nilai intercept Kabupaten/Kota DIY	95



ABSTRAK

Permasalahan pembangunan di Indonesia salah satunya adalah kemiskinan yang masih tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan di atas persentase kemiskinan nasional dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi data panel dengan rentan waktu 2010-2019 dan melibatkan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi data panel, model yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa R-square sebesar 0.9954 atau 99.54% hal ini berarti bahwa sebesar 99.54% variabel indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum kabupaten mampu menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin. Secara parsial variabel IPM dan UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, variabel RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan variabel TPT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Kata Kunci : *kemiskinan, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupate*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan setiap negara meningkatkan pembangunan negara agar negara tersebut semakin maju. Peningkatan pembangunan ekonomi yang tinggi yang akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan suatu negara (Rustam, 2010). Dalam negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan menghambat pembangunan ekonomi, namun tidak semua negara berkembang gagal dalam melakukan produksi, terdapat negara berkembang yang telah berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan nasional untuk melaksanakan pembangunan (Sartika et al, 2016). Tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di suatu daerah atau negara mencerminkan kondisi kemiskinan di suatu daerah atau negara tersebut, semakin sejahtera penduduk yang tinggal di suatu daerah maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut cenderung kecil (Christanto, 2013).

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih sering memiliki masalah sosial dan ekonomi. Salah satu masalah sosial dan ekonomi yang besar di Indonesia adalah kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dalam meningkatnya jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 yakni terdapat 26.42 juta orang atau 9.78% persen. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 meningkat 1,63 juta orang atau 0.56 persen terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada September 2019. Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020

meningkat 1,28 juta orang atau 0.37 persen terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dengan persentase terbesar di Indonesia adalah Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan sebesar 27,53% pada tahun 2019 dan 27,43 persen dalam tahun 2018. Tercatat dalam Berita Resmi Statistik 15 Juli 2019, terdapat 16 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas kemiskinan nasional.

Tabel 1.1 Provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas kemiskinan nasional

NO	Nama Provinsi	September	Maret
		2018 (%)	2019 (%)
1	Papua	27.43	27.53
2	Papua Barat	22.66	22.17
3	Nusa Tenggara Timur	21.03	21.09
4	Maluku	17.85	17.69
5	Gorontalo	15.83	15.52
6	Aceh	15.68	15.32

Tabel 2.1 Provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas kemiskinan nasional (lanjutan)

NO	Nama	September	Maret
	Provinsi	2018 (%)	2019 (%)
7	Bengkulu	15.41	15.23
8	Nusa Tenggara Barat	14.63	14.56
9	Sulawesi Tengah	13.69	13.48
10	Sumatera Selatan	12.82	12.71
11	Lampung	13.01	12.62
12	DI Yogyakarta	11.81	11.70
13	Sulawesi Tenggara	13.69	11.24
14	Sulawesi Barat	11.22	11.02
15	Jawa Tengah	11.19	10.80
16	Jawa Timur	10.85	10.37
	INDONESIA	6.89	6.69

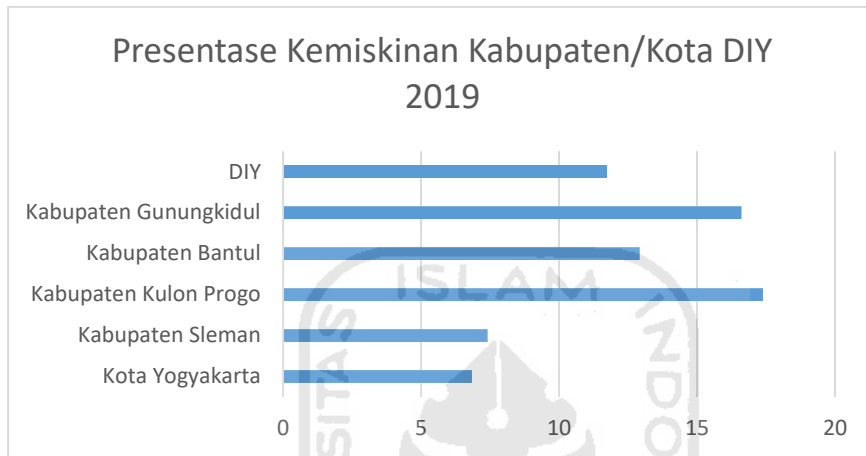
Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 16 provinsi yang tercatat memiliki persentase kemiskinan di atas kemiskinan nasional. 16 provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, mayoritas provinsi tersebut dapat menurunkan persentase kemiskinan dari September 2018 sampai dengan Maret 2019. Hanya terdapat dua provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan, yaitu Papua dengan kenaikan kemiskinan sebesar 0.10% dan NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan kenaikan kemiskinan sebesar 0.06%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori 16 provinsi termiskin di Indonesia. Persentase kemiskinan pada September 2018 di DI Yogyakarta yaitu 11,81% dan pada tahun 2019 bulan Maret yaitu 11,70%. Terdapat penurunan kemiskinan sebesar 0.11% pada rentan waktu September 2018 sampai dengan Maret 2019. Namun, rata-rata persentase kemiskinan secara nasional yaitu 9,66%. Artinya, meskipun di DI Yogyakarta mengalami penurunan kemiskinan, namun persentase kemiskinan di DI Yogyakarta masih berada di atas persentase rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data Bappeda DIY angka garis kemiskinan DIY Rp 432,026.00 (<http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>) hal tersebut berarti seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan maka seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ukuran kemiskinan diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan makanan dilihat berdasarkan kemampuan seseorang mengonsumsi makanan yaitu sebesar 2100 kalori per hari, sementara kebutuhan non makanan dilihat berdasarkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan untuk

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berikut presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta :

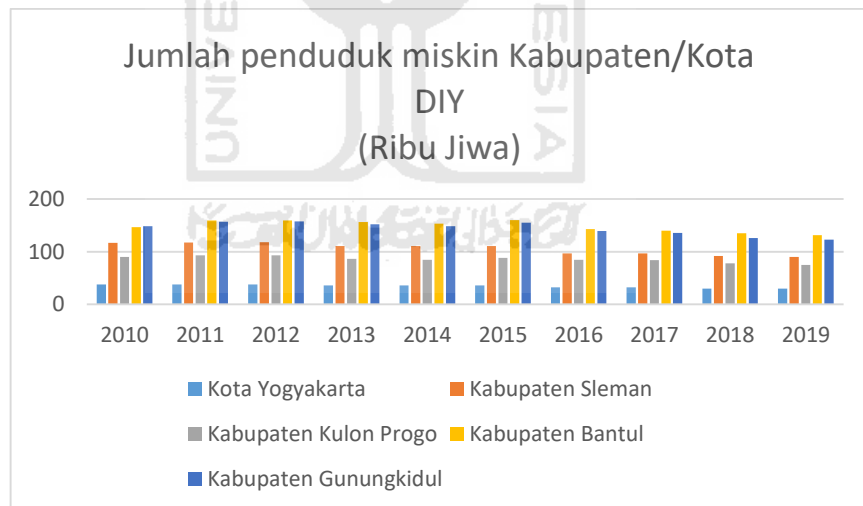


Gambar 1.1 Presentase kemiskinan Kabupaten/Kota DIY 2019

Berdasarkan grafik presentase kemiskinan Kabupaten/Kota DIY di atas, terdapat 3 kabupaten yang masih memiliki presentase kemiskinan lebih tinggi daripada presentase kemiskinan di DIY, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki presentase kemiskinan berturut-turut yaitu 16.61%, 12.92%, dan 17.39% sementara untuk presentase kemiskinan di DIY yaitu 11.70%. Dan untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki presentase di bawah presentase kemiskinan di DIY.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul

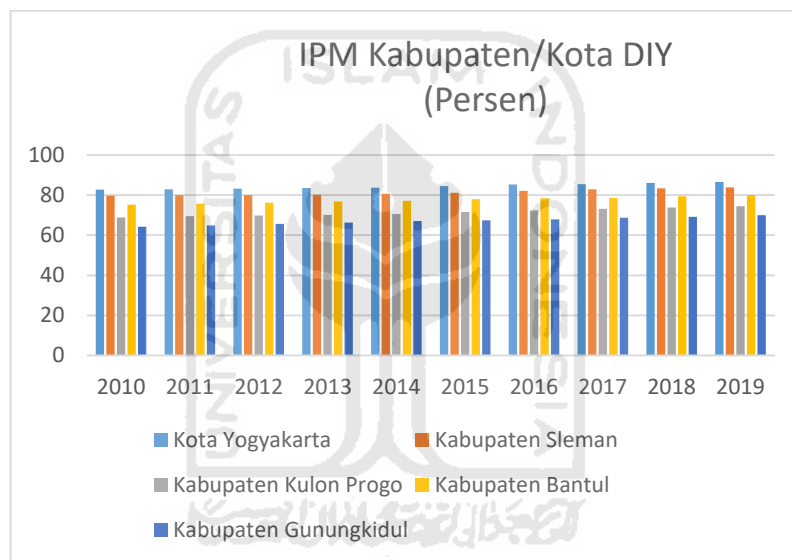
dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sebesar 125,76 ribu jiwa penduduk miskin dan menurun menjadi 123,08 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2019. Sementara untuk Kabupaten Bantul sebesar 134.84 ribu jiwa penduduk miskin, dan menurun pada tahun 2019 menjadi 131.15 ribu jiwa penduduk miskin. Untuk Kota Yogyakarta memiliki penduduk miskin paling sedikit di DI Yogyakarta. Pada tahun 2018 hanya terdapat 29.75 ribu jiwa penduduk miskin di Kota Yogyakarta dan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu terdapat 29.45 ribu jiwa penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Berikut grafik penduduk miskin di Kabupaten/kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019 (Badan Pusat Statistik, 2020) :



Gambar 2.2 Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota DIY 2010-2019

Berdasarkan grafik di atas, daerah perkotaan yaitu Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang sedikit, hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta

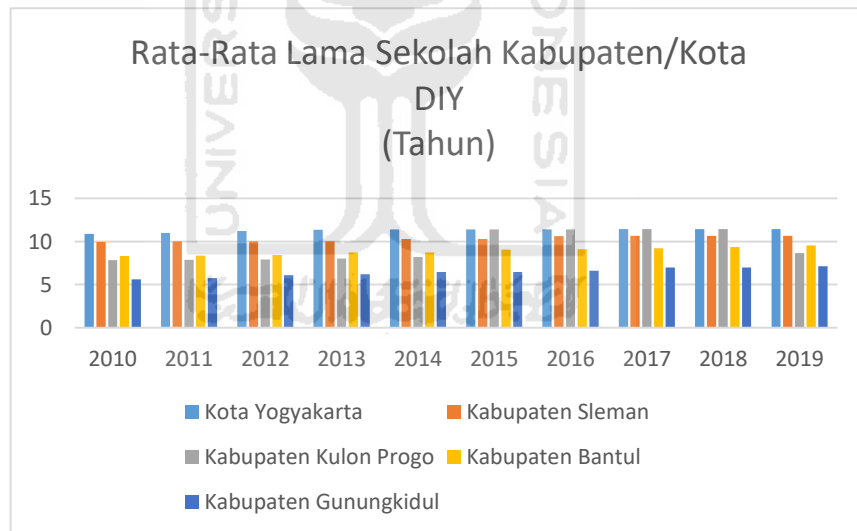
sebagai pusat perekonomian dan pendidikan di Provinsi Yogyakarta. Kemudahan akses pendidikan, didapatkan oleh masyarakat perkotaan. Hal tersebut juga ditunjukkan dalam rendahnya nilai persentase IPM di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Persentase IPM menunjukkan kemudahan untuk mengakses kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Berikut grafik IPM tahun 2010-2019 di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2020) :



Gambar 1.3 IPM Kabupaten/Kota DIY 2010-2019

Berdasarkan grafik di atas, IPM dengan nilai tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dan disusul oleh Kabupaten Sleman di bawahnya. Seperti yang telah diketahui, Kabupaten Sleman sebagai pusat pendidikan di DI Yogyakarta, terdapat 41 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Sleman (BPS Sleman, 2017). Banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sleman tersebut meningkatkan kemudahan akses pendidikan yang merupakan indikator IPM.

Membahas mengenai pendidikan, pembangunan masa depan suatu bangsa dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Menurut Wongdesmiwati (2009) tingkat kemiskinan dapat diturunkan dengan adanya peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Peningkatan pendapatan yang merupakan dampak dari meningkatnya utilitas secara tidak langsung dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan (Todaro, 2000). Tingkatan pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang ditempuh untuk pendidikan formal. Berikut grafik rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta :



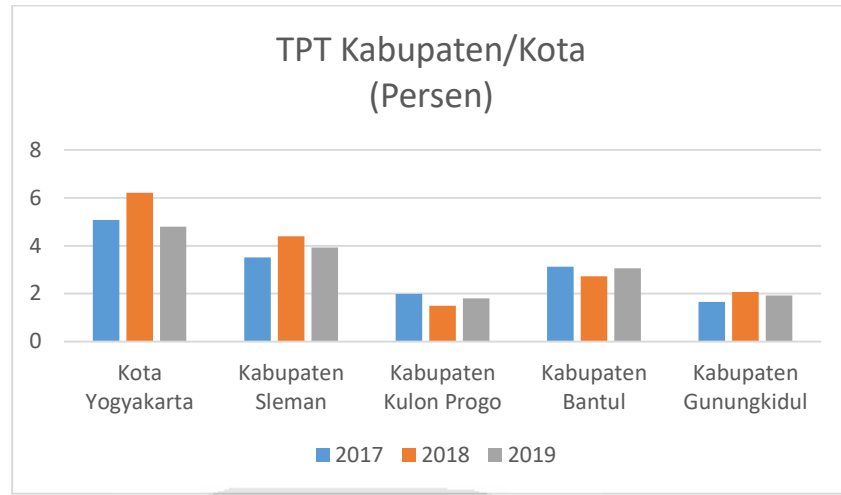
Gambar 1.4 RLS Kabupaten/Kota DIY 2010-2019

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata lama sekolah pada tahun 2010-2019 terendah berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas Kabupaten Kulon Progo. Sementara rata-rata lama

sekolah paling tinggi terdapat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

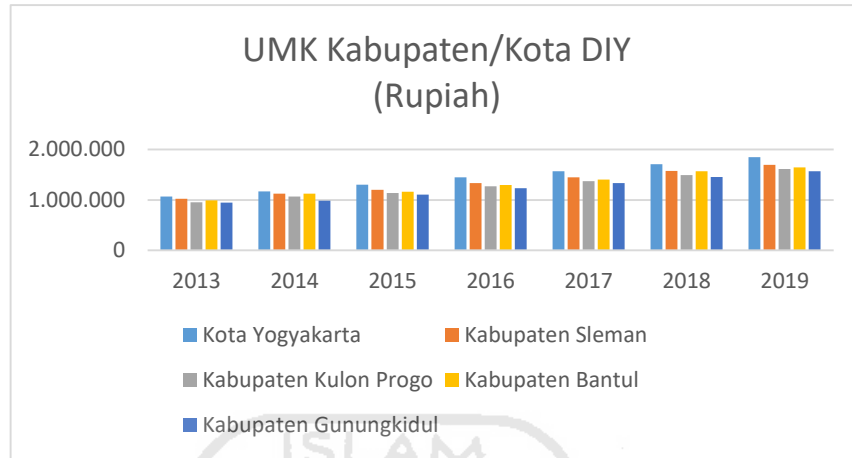
Rata-rata lama sekolah akan berpengaruh terhadap kemudahan dalam mencari pekerjaan yang layak dan memperoleh pendapatan yang tinggi seperti yang dijelaskan oleh Todaro (2000) bahwa peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan. Rata-rata lama sekolah yang rendah akan mengurangi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan akan berdampak kepada pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Sementara pengangguran terbuka merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2017-2019 paling tinggi berada di Kota Yogyakarta dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 adalah 5.08% dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 6.22% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu persentase pengangguran terbuka menjadi 4.8%. Selanjutnya, disusul oleh Kabupaten Sleman dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 3.51 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 4.4%, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman menjadi 3.93%. Sementara tingkat pengangguran terbuka paling rendah di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta yaitu di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul). Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta (BPS DIY, 2020). :



Gambar 1.5 TPT Kabupaten/Kota 2017-2019

Menurut Sakernas dalam BPS DIY (2018) pengangguran yang mendominasi di DI Yogyakarta merupakan pengangguran terdidik, hal tersebut menjelaskan mengapa rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tinggi, namun tingkat pengangguran terbuka juga tinggi. Tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh upah minimum (Mankiw, 2000). Di mana upah minimum regional merupakan standar upah minimum yang diberlakukan dalam provinsi atau wilayah yang bersangkutan. Berikut grafik upah minimum regional Kabupaten/kota DI Yogyakarta (BPS DIY, 2020) :



Gambar 1.6 UMK Kabupaten/Kota DIY 2013-2019

Berdasarkan grafik di atas, tercatat bahwa upah minimum regional Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Penerapan upah minimum regional (UMK) tertinggi berada di Kota Yogyakarta, sementara penerapan UMK terendah berada di Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi jumlah penduduk miskin pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi DI Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel IPM, RLS, TPT, dan UMK terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan variabel IPM, RLS, TPT, dan UMK terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi jumlah penduduk miskin pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi DI Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh secara parsial variabel IPM, RLS, TPT, dan UMK terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh secara simultan variabel IPM, RLS, TPT, dan UMK terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan ilmiah serta proses pembelajaran penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai masukan bagi kalangan peneliti dan akademisi yang tertarik dalam membahas topik penelitian yang sama.
- b. Sebagai bahan studi serta tambahan ilmu bagi peneliti dan akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai pertimbangan untuk menerapkan kebijakan di suatu daerah khususnya di DI Yogyakarta.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kondisi di suatu daerah khususnya di DI Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang merupakan penelitian terdahulu mengenai kemiskinan; landasan teori berupa teori yang menjelaskan kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (RLS), dan upah minimum kabupaten (UMK); formulasi hipotesis dan hipotesis operasional; dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis berupa pendekatan model regresi data panel dan pemilihan model yang yang tepat dalam analisis regresi data panel serta membahas mengenai uji statistik yang meliputi koefisien determinasi, uji parsial (uji t), dan uji bersama-sama (uji f).

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari penelitian ini yang didasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu hasil dari analisis statistik deskriptif

setiap variabel yang digunakan, hasil dari pemilihan model dalam regresi data panel, hasil analisis koefisien determinasi, hasil analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, hasil analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama, dan hasil analisis kemiskinan tertinggi dan terendah di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai perbandingan atau acuan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. Salah satu ciri dan karakteristik penelitian yaitu proses yang berjalan terus-menerus dan dapat disempurnakan, sehingga penelitian saat ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dari segi waktu penelitian, karena hasil dari suatu penelitian dapat berubah sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan informasi dan landasan teori mengenai penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
1	Unggul Priyadi dan Jati Asmoro ; Analisis Faktor-Faktor Penentu yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Regional di Indonesia ; UNISIA ; 2011.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian <i>human development index</i> (HDI/IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
2	Noor Zuhdiyaty ; Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi) ; Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (JIBEKA) ; 2017.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian Indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
3	Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, dan Een N.Walewangko ; Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara ; Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah ; 2018.	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan hasil penelitian tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara.
4	Juergen J.E. Manoppo, Daisy S.M.Engka, dan Steva Y.L Tumangkung ; Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kota Manado ; Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi ; 2018.	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan hasil penelitian tingkat pendidikan kepala keluarga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kota Manado.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
5	Almira Qatrunnada Qurratu'ain dan Vita Ratnasari ; Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel ; Jurnal Sains Dan Seni ITS ; 2016.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian Angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
6	Ridzky Giovanni ; Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016 ; <i>Economics Development Analysis Journal</i> ; 2018.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
7	Sussy Susanti ; Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel ; Jurnal Matematika Integratif ; 2013.	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan hasil penelitian pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
8	Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik ; Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di ASEAN ; Jurnal Ilmu Ekonomi ; 2017.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN.
9	Ratih Purbosiwi ; Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan ; Jurnal PKS ; 2016.	Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan hasil penelitian pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta.
10	Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari ; Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014 ; Journal of Research in Economics and Management ; 2017.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu menggunakan variabel IPM, pendidikan (rata-rata lama sekolah), tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum sebagai variabel bebas. Sementara perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data terbaru yakni 2010 s.d 2019.

1.6 Landasan teori

1.6.1 Kemiskinan

1.6.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran, di mana ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan maka seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita selama satu bulan dibawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin. Di mana garis kemiskinan merupakan hasil penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan non Makanan (GKNM) (Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut Mubyarto (2005) kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan seseorang mengakses sumber pendapatan dan juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang menjebak seseorang dalam lingkungan kemiskinan karena tidak ada peluang untuk keluar dari kondisi tersebut.

Menurut Supriatna (2000) kemiskinan merupakan situasi yang terbatas dan bukan merupakan kehendak dari orang yang bersangkutan. Kemiskinan dapat ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah yang berdampak kepada kesejahteraan yang rendah pula. Berdasarkan hal tersebut maka kemiskinan menunjukkan adanya lingkaran ketidakberdayaan. Rendahnya pendidikan informal akibat dari rendahnya sumber daya manusia yang terbatas dapat menyebabkan kemiskinan.

1.6.1.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2010) ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang yang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan absolut memiliki konsep bahwa pemenuhan kebutuhan fisik berupa makanan, pakaian, dan perumahan digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi di mana pemenuhan kebutuhan masih lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, artinya garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah.

3. Kemiskinan Kultural

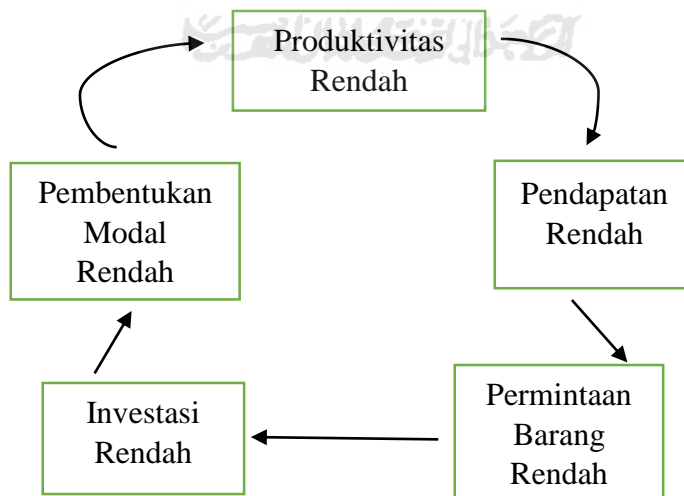
Seseorang yang termasuk dalam golongan miskin kultural apabila seseorang atau kelompok masyarakat tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Sehingga kemiskinan kultural ini dapat diartikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sikap seseorang yang malas untuk berusaha dan memperbaiki kehidupannya.

1.6.1.3 Lingkaran perangkap kemiskinan

Lingkaran perangkap kemiskinan merupakan keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan suatu negara atau seseorang terjebak dalam kondisi kemiskinan. Berikut merupakan lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse dalam Kuncoro (2006) :

1. Dari sisi permintaan

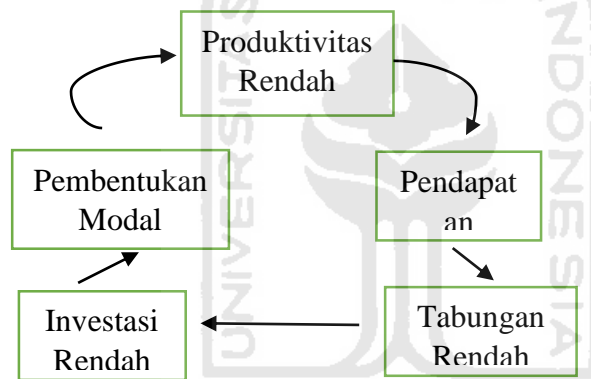
Lingkaran setan kemiskinan dari sisi permintaan yaitu berhubungan dengan permintaan atas suatu barang atau jasa untuk kebutuhan sehari-hari maupun ataupun untuk investasi. Ketika pendapatan yang akan didapatkan rendah, maka pengeluaran untuk belanja juga rendah atau dengan kata lain permintaan barang rendah. Permintaan barang yang rendah akan menyebabkan investasi yang rendah karena pengeluaran untuk hal investasi rendah selanjutnya akibat dari investasi yang rendah tersebut maka pembentukan modal juga rendah yang berdampak kepada produktivitas yang rendah.



Gambar 2.7 Lingkaran perangkap kemiskinan sisi permintaan

2. Dari sisi penawaran

Lingkaran kemiskinan dari sisi penawaran yaitu berhubungan dengan seseorang menciptakan lapangan kerja melalui tingkat tabungan yang tinggi. Namun ketika tabungan rendah maka seseorang cenderung tidak bisa membuka usaha atau berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan rendah maka tabungan akan rendah yang menyebabkan investasi rendah sehingga pembentukan modal juga rendah yang akan berdampak kepada produktivitas yang rendah.



Gambar 2.8 Lingkaran perangkap kemiskinan sisi penawaran

2.2.1.4 Dampak kemiskinan absolut

Kemiskinan memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, terutama kemiskinan absolut di mana seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Hakim (2010) terdapat 1,4 miliar penduduk miskin yang tidak mendapatkan kesejahteraan hidup akibat kemiskinan absolut. Kurangnya kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari pola hidup masyarakat miskin. Masyarakat yang tergolong masuk dalam kemiskinan absolut 60-80% pendapatannya dibelanjakan

untuk memenuhi kebutuhan berupa makanan dengan menu yang sama di setiap harinya. Terdapat 60% masyarakat yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Harapan hidup anak yang pendek, yaitu satu dari 10 anak yang lahir meninggal pada 10 tahun pertama. Dua per tiga masyarakat miskin mengalami kekurangan air bersih dan kekurangan sistem yang cukup untuk kegiatan buang air. Masyarakat miskin hanya memiliki rata-rata harapan hidup selama 45 tahun, melek huruf hanya sekitar 33-40% penduduk dewasa, dan 4 dari 20 anak yang menyelesaikan 4 tahun sekolah dasar.

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.2.2.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan secara umum dapat didefinisikan sebagai bagaimana penduduk dapat mendapatkan kehidupan yang layak dari hasil pembangunan yang telah ditetapkan. Kehidupan yang layak tersebut menyangkut perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dengan memasukkan indikator harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik (2020) terdapat tiga konsep pembangunan manusia, yaitu :

1. Pembangunan manusia merupakan suatu proses pembangunan yang memiliki tujuan untuk memiliki banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia dijadikan sebagai tolak ukur untuk

pembangunan secara keseluruhan yang terdiri atas tiga dimensi dasar. Adapun tiga dimensi dasar tersebut yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

2. Pembangunan memiliki tujuan utama yaitu menjadikan masyarakat memiliki dan menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalankan kehidupannya dengan produktif (*United Nation Development Progamme-UNDP*).
3. Pembangunan manusia juga dapat didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi masyarakat (*a process of enlarging people's choices*).

2.2.2.2 Variabel dalam IPM Metode Baru

Terdapat empat variabel Indeks Pembangunan Manusia dalam metode baru (BPS, 2020), yaitu :

1. AHH (Angka Harapan Hidup Saat Lahir)

Variabel AHH mendefinisikan sebagai tingkat kesehatan dalam masyarakat. AHH dihitung berdasarkan rata-rata tahun yang dapat seseorang tempuh sejak lahir. AHH ini dihitung dari hasil sensus penduduk dan survey penduduk.

2. RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)

Usia penduduk yang masuk dalam perhitungan rata-rata lama sekolah yaitu penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menempuh pendidikan secara formal.

3. AHLS (Angka Harapan Lama Sekolah)

Angka harapan lama sekolah merupakan harapan anak pada umur tertentu di masa yang akan datang mengenai lamanya sekolah (dalam tahun). Dalam perhitungan variabel AHLS mengasumsikan bahwa anak yang tetap bersekolah pada umur berikutnya dan anak yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini memiliki peluang yang sama. Perhitungan AHLS dimulai pada penduduk usia 7 tahun.

4. Pengeluaran per kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan oleh nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menghitung pengeluaran per kapita konstan/riil menggunakan tahun dasar 2012=100. Perhitungan pengeluaran per kapita menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan). Sementara perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.2.2.3 Perhitungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia dan Perhitungan nilai IPM

1. Perhitungan Dimensi Kesehatan :

$$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Perhitungan Dimensi Pendidikan :

$$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

Di mana :

HLS = Harapan Lama Sekolah

3. Perhitungan Dimensi Pengeluaran :

$$I \text{ pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

4. Perhitungan IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$$

Hasil pengukuran IPM dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kategori IPM rendah ($IPM < 60$), kategori IPM sedang ($60 \leq IPM < 70$), kategori IPM tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan kategori IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

2.2.2.4 Pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap kemiskinan

Indeks pembangunan manusia memiliki tiga indikator yakni kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Indikator tersebut mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesehatan yang baik mencerminkan bahwa kebutuhan akan gizi makanan tercukupi. Selanjutnya pendidikan, ketika seseorang dapat menempuh pendidikan formal maka hal tersebut mencerminkan bahwa seseorang tersebut hidup dalam kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhan yang ada dengan pendapatan yang lebih dari cukup. Dengan terpenuhinya aspek kesehatan dan aspek pendidikan maka seseorang akan mendapatkan kehidupan yang layak.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan maka seseorang tersebut sulit untuk memperoleh tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai. Sehingga kondisi kemiskinan ini seringkali membuat hidup seseorang menjadi kurang sejahtera dan kemiskinan ini menjadikan seseorang mendapatkan kehidupan yang kurang layak.

Menurut Rasidin K dan Bonar M (2004) pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat miskin. Sehingga hubungan IPM dengan kemiskinan menurut teori yaitu berhubungan negatif, di mana ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan serta mendapatkan kehidupan yang layak maka seseorang tersebut masuk dalam kategori yang hidup sejahtera. Namun ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tidak mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan serta kehidupan yang layak maka seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin.

2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

2.2.3.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan menurut Notoatmodjo (2010) merupakan pembelajaran yang bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tindakan-tindakan (praktik) serta mampu mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesehatannya. Pengetahuan dan proses pembelajaran menjadi dasar untuk pendidikan kesehatan, sehingga perilaku tujuan dari adanya pendidikan ini diharapkan dapat berlangsung lama dan bertahan

(menetap) karena perilaku tersebut didasari atas dasar kesadaran. Tingkat pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan merupakan indikator dari tingkat pendidikan. Di mana jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, yang akan mencapai tujuan, dan dapat mengembangkan kemampuan. Adapun jenjang pendidikan tersebut yaitu :

1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar yaitu 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat, seperti pendidikan untuk mengembangkan sikap, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan dasar (Ihsan, 2006). Pendidikan dasar ini terdiri atas sekolah dasar atau *Madrasah Ibtidaiyah* dan SMP atau MTs.

2. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah bertujuan untuk mempersiapkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ataupun masuk dalam dunia kerja (Ihsan, 2006). Jenjang pendidikan menengah meliputi SMA atau MA dan SMK atau MAK.

3. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan dapat menerapkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian di lingkungan masyarakat. Jenjang pendidikan tinggi meliputi akademik, institut, dan sekolah tinggi.

2.2.3.2 Definisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun belajar untuk penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan pendidikan tersebut telah diselesaikan dalam pendidikan formal, namun tahun yang mengulang tidak dihitung dalam rata-rata lama sekolah. Partisipasi sekolah, jenis dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki atau pernah diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan kelas tertinggi yang sedang diduduki atau pernah diduduki merupakan informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan rata-rata lama sekolah (Badan Pusat Statistik, 2020).

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

Di mana :

P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke- i , meliputi :

- a. Tidak pernah sekolah = 0
- b. Masih sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) s.d jenjang sarjana strata 1 (S1) = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
- c. Masih sekolah pada jenjang sarjana strata dua (S2) atau jenjang sarjana strata tiga (S3) = konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak melanjutkan sekolah dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir

- e. Tidak melanjutkan sekolah dan tidak tamat di kelas terakhir =
konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1777777

2.2.3.3 Pengaruh rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap kemiskinan

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun seseorang dalam menempuh pendidikan. Semakin lama rata-rata lama sekolah maka pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan semakin tinggi. Sesuai dengan jenjang pendidikan ketika seseorang sudah memasuki pada jenjang pendidikan menengah maka seseorang tersebut telah siap untuk memasuki dunia kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi juga kesiapan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja terdapat posisi-posisi yang memiliki standar minimal pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan maka posisi yang didapatkan dalam pekerjaan semakin layak. Kelayakan posisi dalam pekerjaan ini memengaruhi upah yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka upah yang diterima akan semakin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengembangan sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan, karena melalui pendidikan selain menambah pengetahuan namun juga dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi, yaitu *reward* (imbalan) yang diberikan oleh pendidikan sebagai bentuk peningkatan penghasilan (Payaman Simanjuntak, 2001). Sehingga rata-rata lama sekolah dan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif menurut teori, di mana semakin tinggi

pendidikan maka upah yang didapatkan dalam bekerja akan semakin tinggi dan kemiskinan akan menurun.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.2.4.1 Definisi Pengangguran

Menurut Mankiw (2006) pengangguran merupakan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja.

Tingkat pengangguran

$$= \frac{\text{Jumlah yang tidak bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100$$

Angkatan kerja yang tidak bekerja ini dikategorikan dalam penduduk yang tidak bekerja untuk sementara pekerja atau penduduk yang sedang dalam masa mencari pekerjaan. Adapun usia untuk penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 15 tahun dan lebih. Sementara untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan tidak termasuk dalam angkatan kerja. Terdapat empat jenis pengangguran, yaitu :

1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak sedang mencari pekerjaan, pengangguran terbuka juga dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mulai menyerah dalam mencari kerja dan merasa bahwa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Namun pengangguran terbuka juga dapat menggambarkan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan

tetapi belum mulai bekerja (BPS,2020). Sementara persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja disebut dengan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan ataupun perbedaan lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan.

2. Setengah pengangguran

Standar jam kerja per hari yaitu 7-8 jam. Ketika seseorang bekerja namun tidak memenuhi standar jam kerja per hari maka seseorang tersebut disebut dengan setengah pengangguran.

3. Pengangguran terselubung

Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang disebabkan karena seseorang yang memiliki pekerjaan namun memiliki produktivitas yang rendah.

4. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergantian musim.

2.2.4.2 Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran merupakan seseorang yang tidak dalam masa bekerja, dengan kata lain pengangguran tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kehidupannya. Dampak negatif dari pengangguran yaitu pendapatan masyarakat menurun dan menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran seseorang (Sadono Sukirno, 2004). Sehingga berdasarkan teori yang ada ketika

seseorang tidak memiliki pendapatan maka kesejahteraan hidupnya juga berkurang, karena ia tidak bisa memenuhi kebutuhan akan makanan maupun bukan makanan.

Menurut Lincoln (2016) menyatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat, kelompok masyarakat yang dalam kategori miskin merupakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja separuh waktu. Sehingga hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan kemiskinan menurut teori yaitu positif, di mana ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang tersebut tidak dalam keadaan kehidupan yang layak. Sehingga ketika tingkat pengangguran terbuka (TPT) tinggi, kemiskinan akan bertambah.

2.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

2.2.5.1 Definisi Upah

Upah secara umum dapat didefinisikan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan (pemberi kerja) kepada pekerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pengertian upah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1) upah merupakan imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang dan menjadi hak bagi pekerja/buruh termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan. Menurut Sadono Sukirno (2005) terdapat dua pengertian upah yaitu :

1. Upah nominal, upah normal ini berupa upah uang yang diterima oleh pekerja dari para pemberi kerja sebagai bentuk pembayaran atas tenaga pekerja yang telah digunakan pada saat proses produksi.
2. Upah riil, upah riil ini diukur dari tingkat kemampuan pekerja untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Terdapat beberapa komponen yang masuk ke dalam komponen upah menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, yaitu:

1. Upah pokok, imbalan dasar yang dikategorikan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan yang diterima oleh pekerja dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian.
2. Tunjangan tetap, tunjangan tetap ini berupa tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan yang dibayarkan bersama dengan upah pokok. Tunjangan tetap ini dibayarkan kepada pekerja/buruh dan keluarganya secara tetap.
3. Tunjangan tidak tetap, tunjangan tidak tetap tidak dibayarkan bersama dengan upah pokok, tunjangan tidak tetap ini diperoleh pekerja/buruh dan keluarganya melalui pembayaran langsung dan tidak langsung yang diberikan secara tidak tetap.
4. Fasilitas, fasilitas ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh berupa bentuk nyata dan karena hal-hal yang bersifat khusus

5. Bonus, pembayaran diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas hasil keuntungan perusahaan atau pekerja/buruh memiliki prestasi untuk meningkatkan produksi yang melebihi target produksi normal.

2.2.5.2 Kebijakan Upah Minimum

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) upah minimum regional (UMR) merupakan standar minimum pemberian upah atau imbalan jasa dari para pengusaha kepada pekerja. Peraturan kebijakan upah minimum terdapat pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi :

1. Upah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum diharapkan dapat mencapai kebutuhan hidup layak bagi masyarakat.
2. Penetapan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Penetapan upah minimum sektoral berdasarkan kelompok lapangan usaha serta pembagian upah minimum sektoral menurut klasifikasi lapangan usaha di Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi, dan nasional. Selanjutnya penetapan upah minimum sektoral berada di atas upah minimum regional.
3. Dalam penetapan upah minimum, Gubernur memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
4. Ketika perusahaan tidak mampu memberikan upah minimum maka diberikan penangguhan, penangguhan bagi perusahaan ini merupakan pembebasan

perusahaan yang bersangkutan untuk membayar upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Sehingga ketika sudah habis masa penangguhan yang berlaku, maka perusahaan wajib membayar upah minimum pada saat itu namun tidak wajib membayar upah minimum pada saat penangguhan.

2.2.5.3 Pengaruh UMK (Upah Minimum Kabupaten) terhadap kemiskinan

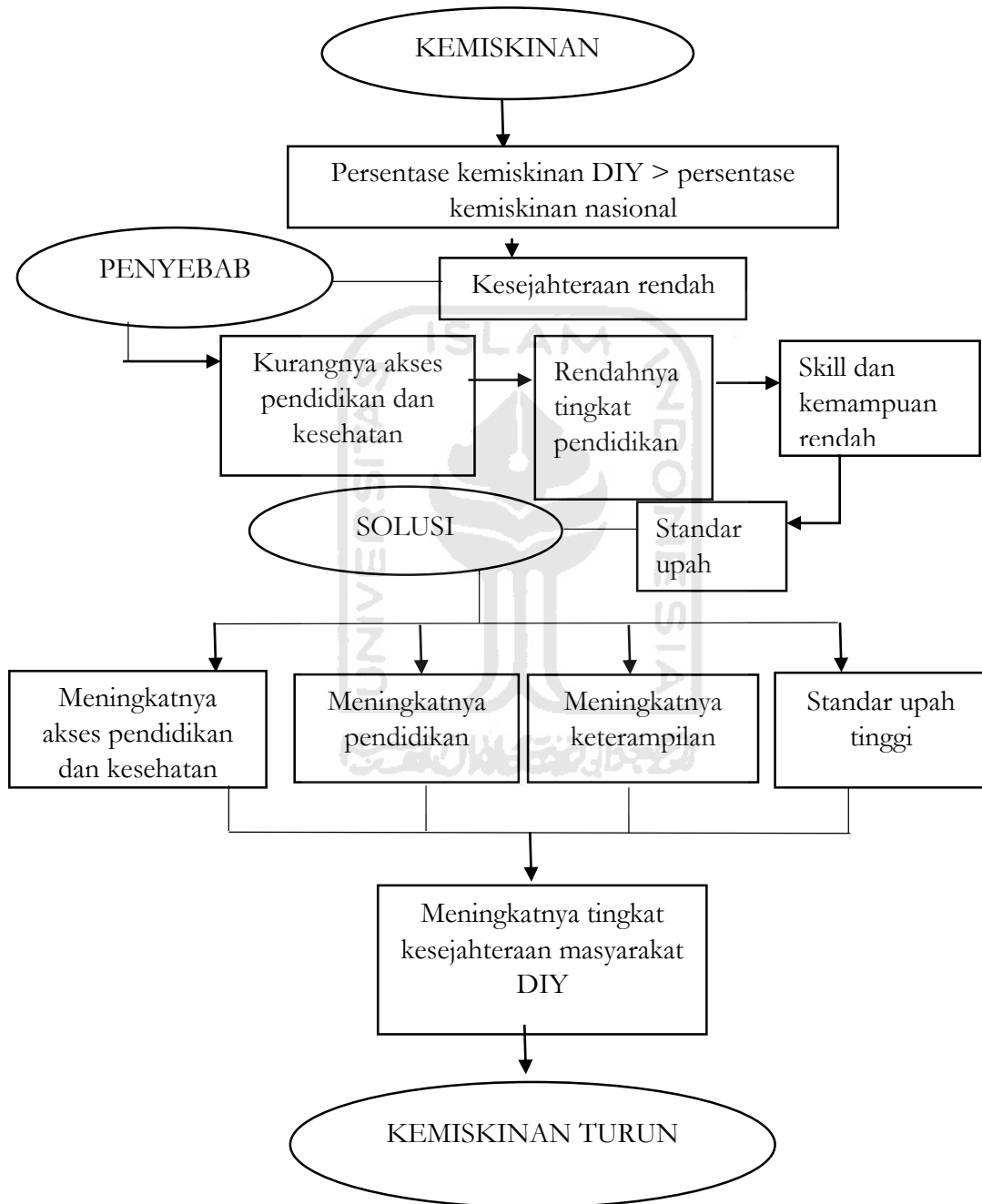
Upah minimum ditujukan untuk mencapai kehidupan yang layak yang merupakan standar pemberian upah minimum yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Dengan adanya upah minimum regional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja melalui bertambahnya pendapatan dan dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan meningkatnya pendapatan dari pekerja, maka diharapkan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kehidupan yang layak.

Hubungan antara upah minimum kabupaten (UMK) dengan kemiskinan berdasarkan teori yang telah dijelaskan yaitu negatif. Di mana ketika terdapat kebijakan upah minimum kabupaten yang tinggi, maka pendapatan pekerja akan meningkat yang berdampak kepada konsumsi yang meningkat. Konsumsi yang meningkat ini mencerminkan bahwa seseorang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai bagaimana teori berhubungan dan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting yang

dituangkan dalam model konseptual (Sugiyono, 2010). Berikut skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.9 Kerangka pemikiran

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi, hal tersebut dapat tunjukkan dalam persentase kemiskinan di DIY yang lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan di DIY pada tahun 2019 yaitu 11.70% sementara persentase kemiskinan nasional pada tahun 2019 yaitu 6.69% (BPS, 2019). Tingginya persentase kemiskinan di DIY ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyebab dari kemiskinan yaitu kurangnya akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pedesaan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya skill dan kemampuan, serta rendahnya standar upah yang ditetapkan. Untuk mencapai kesejahteraan maka terdapat solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, meningkatnya pendidikan, meningkatnya keterampilan, dan standar upah yang tinggi. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY dan menurunkan kemiskinan yang ada.

2.4 Formulasi Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka didapatkan formulasi hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga variabel indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum kabupaten (UMK) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.
2. Diduga variabel indeks pembangunan manusia (IPM) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Jika variabel indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami kenaikan, maka jumlah

penduduk miskin akan berkurang. Jika variabel indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah.

3. Diduga variabel rata-rata lama sekolah (RLS) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Jika variabel rata-rata lama sekolah (RLS) mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Jika variabel rata-rata lama sekolah (RLS) mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang.
4. Diduga variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Jika variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Jika variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang.
5. Diduga variabel upah minimum kabupaten (UMK) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Jika variabel upah minimum kabupaten (UMK) mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Jika variabel upah minimum kabupaten (UMK) mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang.

2.5 Hipotesis Operasional

2.5.1 Hipotesis operasional uji simultan

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh secara simultan IPM, RLS, TPT, UMK terhadap PM).

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (Terdapat pengaruh secara simultan IPM, RLS, TPT, UMK terhadap PM)

2.5.2 Hipotesis operasional uji parsial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan IPM terhadap PM).

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan IPM terhadap PM).

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

$H_0 : \beta_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan RLS terhadap PM)

$H_a : \beta_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan RLS terhadap PM).

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$H_0 : \beta_3 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan TPT terhadap PM).

$H_a : \beta_3 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan TPT terhadap PM).

4. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

$H_0 : \beta_4 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan UMK terhadap PM).

$H_a : \beta_4 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan UMK terhadap PM).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan yaitu data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section dari tahun 2011-2015 dari 5 kabupaten di DI Yogyakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (independen) yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah regional minimum (IPM) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan di DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) kemiskinan dan variabel bebas (independen) indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum regional (UMK).

3.3 Variabel terikat (dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan. Pengertian dari kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data kemiskinan pada penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019. Data jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota DI Yogyakarta diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

3.4 Variabel bebas (independen)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel terikat (dependen). Berikut variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur untuk menilai kualitas pembangunan manusia yang memasukkan indikator kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Data indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan persen.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal, namun tidak termasuk tahun yang mengulang. Data rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan tahun.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data tingkat pengangguran terbuka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengangguran terbuka Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan persen.

4. Upah Minimum Regional (UMK)

Upah minimum regional merupakan standar minimum pemberian upah atau imbalan jasa dari para pengusaha kepada pekerja. Data upah minimum regional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data upah minimum regional Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada tahun 2010-2019 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.5 Metode Analisis

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk melakukan penelitian apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen.

$$\ln PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln IP_{Mit} + \beta_2 \ln RLS_{it} + \beta_3 \ln TPT_{it} + \beta_4 \ln UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PM	= Penduduk Miskin (Jiwa)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
RLS	= Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten (Rupiah/bulan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien Regresi
ε	= Variabel Di Luar Model
i	= entitas ke-i
t	= periode ke-t

Terdapat keuntungan ketika menggunakan data panel yaitu merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, sehingga dengan menggunakan data panel maka data yang diperoleh akan lebih banyak yang akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Keuntungan selanjutnya yaitu dengan menggunakan data

panel masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*) dapat teratasi karena terdapat gabungan informasi dari *data time series* dan data *cross-section* (Widarjono, 2013).

3.6 Pendekatan Model Regresi Data Panel

3.6.1 Model Common effect

Pendekatan *common effect* merupakan pendekatan data panel yang hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan perbedaan antar individu, dengan kata lain metode *common effect* mengasumsikan bahwa perilaku antar data individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model common effect ini di estimasi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *common effect* (Widarjono, 2013):

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

i = Banyaknya observasi (1,2,.....,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,.....,t)

n x t = Banyaknya data panel

ε = residual

3.6.2 Model Fixed Effect

Pendekatan *fixed effect* merupakan pendekatan data panel yang melihat atau memperhatikan perbedaan konstanta dalam model. Dalam pendekatan fixed effect ini

menyatakan bahwa dalam berbagai periode waktu obyek observasi memiliki nilai konstanta tetap dan koefisien regresi yang tetap dari waktu ke waktu. Terdapat dua asumsi yang digunakan dalam pendekatan fixed effect yaitu slope konstan namun intersep bervariasi antar unit dan slope konstan namun intersep bervariasi antar unit dan antar periode waktu. Untuk menjelaskan adanya perbedaan intercept maka dimasukkan variabel semu (*dummy*) dalam model fixed effect. Model *fixed effect* ini di estimasi menggunakan metode LSDV (*Least Squares Dummy Variables*). Berikut persamaan regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect* dengan asumsi slope regresi konstan namun intercept berbeda-beda antar unit (Jaka Sriyana, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

i = Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,...,t)

n x t = Banyaknya data panel

ε = residual

3.6.3 Model random effect

Model *random effect* merupakan model yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intercept dan konstanta yang disebabkan oleh residual yang merupakan akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara acak (*random*), sehingga model random effect ini disebut juga dengan *error component model*. Sama

dengan fixed effect bahwa model random effect juga memiliki dua asumsi yaitu intercept, slope berbeda antar individu dan intercept, slope berbeda antar individu dan periode waktu. Berikut persamaan model random effect dengan asumsi intercept dan slope berbeda antar individu (Jaka Sriyana, 2014) :

$$Y_{it} = \beta_0 i + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

i = Banyaknya observasi (1,2,...,n)

t = Banyaknya waktu (1,2,...,t)

$n \times t$ = Banyaknya data panel

ε = residual

3.7 Pemilihan model yang tepat dalam analisis regresi data panel

Menurut Sriyana (2014) terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk memilih model yang tepat dalam regresi data panel, adapun tiga uji tersebut yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Uji Chow (Uji F)

Uji F yaitu uji yang digunakan untuk memilih antara model common effect yaitu model yang mengasumsikan bahwa slope dan intercept tetap antar individu dan antar waktu atau model fixed effect yaitu model yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intercept dengan menambahkan variabel dummy untuk regresi data panel

yang tepat. Uji F dilakukan dengan cara melihat nilai *sum of squares (RSS)* dari model common effect dan model *fixed effect*. Berikut rumus untuk mencari nilai F statistik :

$$F_{hitung} = \frac{(RSS1 - RSS2)/i - 1}{(RSS2)/(it - i - k)}$$

Keterangan :

RSS1 = *residual sum squares* dari model *common effect*

RSS2 = *residual sum squares* dari model *fixed effect*

i = jumlah individu

t = jumlah periode waktu

k = banyaknya parameter dalam model *fixed effect*

Setelah didapatkan nilai F hitung maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai F tabel, nilai F tabel dapat diperoleh dengan df sebesar m untuk numerator dan n-k untuk denumerator. Uji F memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada perbedaan dalam intercept (model common effect)

H_a = Terdapat perbedaan dalam intercept (model fixed effect)

Apabila nilai F hitung lebih besar (>) daripada F tabel, maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan dalam intercept. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil (<) daripada F tabel maka H_0 diterima, artinya tidak ada perbedaan dalam intercept.

Selain menggunakan nilai F hitung dan F tabel untuk memilih model yang tepat yaitu menggunakan probabilitas. Apabila probabilitas yang didapatkan kurang dari (<) alpha (α) 0.10 maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya, apabila probabilitas yang didapatkan lebih dari (>) alpha (α) maka H_0 diterima.

3.7.2 Uji LM

Uji LM yaitu uji yang digunakan untuk memilih antara model random effect yaitu model atau model common effect yang menggunakan OLS (Ordinary Least Squares). Berikut rumus untuk mencari nilai LM:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t \epsilon_{it}}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t \epsilon_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T - \overline{\epsilon_{it}})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t \epsilon_{it}^2} \right]$$

Keterangan :

t = jumlah periode waktu

ϵ = residual dari model common effect

Setelah didapatkan nilai LM hitung, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai X^2 tabel. Untuk mencari nilai X^2 tabel menggunakan df sebagai jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM sebagai berikut :

H_0 = Model common effect

H_a = Model random effect

Apabila nilai LM hitung lebih besar ($>$) daripada nilai X^2 tabel, maka H_0 diterima, artinya model common effect lebih baik daripada model random effect. Dan sebaliknya, apabila LM hitung lebih kecil ($<$) daripada nilai X^2 tabel, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model random effect lebih baik daripada model common effect.

3.7.3 Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih apakah model yang menggunakan metode LSDV (model fixed effect) lebih baik daripada menggunakan metode GLS (model random effect). Berikut rumus untuk menghitung nilai Hausman statistik (kriteria Wald) yang akan mengikuti distribusi chi-squares :

$$W = X^2[K] = [\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS}]' \sum^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$$

Setelah didapatkan nilai Hausman statistik (W hitung) maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai kritis chi-squares. Berikut hipotesis untuk uji hausman:

H_0 = Model random effect

H_a = Model fixed effect

Apabila nilai W hitung lebih besar ($>$) daripada nilai kritis chi-squares maka H_0 diterima, artinya model random effect lebih baik daripada model fixed effect. Dan sebaliknya, apabila nilai W hitung lebih kecil ($<$) daripada nilai kritis chi-squares maka H_0 ditolak, artinya model random effect lebih baik daripada model fixed effect.

Selain menggunakan nilai W hitung dengan nilai kritis chi-squares, dapat digunakan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) daripada nilai

alpha (α) maka H_0 diterima. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) daripada nilai alpha (α) maka H_0 ditolak (Widarjono (2013), Sriyana (2014)).

3.6 Uji Statistik

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik berupa koefisien determinasi (R^2), uji secara parsial (Uji T) dan uji secara bersama-sama (Uji F).

3.6.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa baik analisis dalam model, besarnya nilai R^2 menentukan proporsi variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam model, sementara selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berikut rumus untuk mencari nilai R^2 :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

$$R^2 = 1 - (\sum \hat{e}^2) / (\sum y^2 i)$$

$$R^2 = 1 - (\sum \hat{e}^2) / (\sum Yi - \bar{Y})^2$$

Namun, nilai R^2 akan mengalami peningkatan apabila terjadi penambahan variabel independen, sehingga terdapat alternatif dari R^2 yaitu disebut dengan \bar{R}^2 yang disesuaikan. Berikut rumus untuk mencari nilai \bar{R}^2 yang disesuaikan :

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(\sum \hat{e}^2 i) / (n - k)}{(\sum Yi - \bar{Y})^2 / (n - 1)}$$

3.6.2 Uji parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika satu variabel independen di uji maka diasumsikan bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap, dan seperti itu seterusnya. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari nilai t hitung :

$$t = \frac{\hat{\beta}_i}{se(\hat{\beta}_i)}$$

Selanjutnya, diperlukan mencari nilai t kritis untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara parsial atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t kritis dapat didapatkan di tabel t dengan melihat nilai *degree of freedom* (df) = n-k dan alpha (0.10) Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 = 0$ (Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).

$H_a = \beta_1 \neq 0$ (Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Ketika nilai t hitung lebih besar (>) daripada t kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila nilai t hitung lebih kecil (<) daripada t kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

Selain menggunakan nilai t hitung dan t kritis dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan terdapat pengaruh atau tidak secara parsial variabel independen terhadap dependen, yaitu ketika nilai probabilitas lebih kecil ($<$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 diterima. Dan sebaliknya, ketika nilai probabilitas lebih besar ($>$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 ditolak.

3.6.3 Uji bersama-sama (Uji F)

Uji f bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut rumus untuk mencari nilai F hitung :

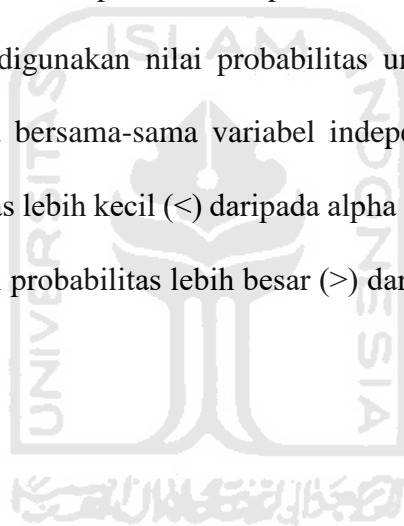
$$F = \frac{ESS/(n - k)}{ESS/(n - k)} = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Selanjutnya, diperlukan mencari nilai F kritis untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara parsial atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t kritis dapat didapatkan di tabel F dengan melihat nilai *degree of freedom* (df) numerator = (k-1) dan *degree of freedom* (df) = (n-k) dengan alpha (0.10) Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen).

$H_a = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (Secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Ketika nilai F hitung lebih besar ($>$) daripada F kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila nilai F hitung lebih kecil ($<$) daripada F kritis maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menggunakan nilai F hitung dan F kritis dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan terdapat pengaruh atau tidak secara bersama-sama variabel independen terhadap dependen, yaitu ketika nilai probabilitas lebih kecil ($<$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 diterima. Dan sebaliknya, ketika nilai probabilitas lebih besar ($>$) daripada alpha (α) 0.10 maka H_0 di tolak.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis dan pembahasan dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum regional (UMK) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Analisis ini menggunakan data cross-section dan time series dengan 5 Kabupaten/Kota DI Yogyakarta dan pada periode tahun 2010-2019, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 50 data. Dalam penelitian ini, analisis regresi data panel dimulai dengan pemilihan metode yang tepat untuk dijadikan sebagai hasil analisis. Metode tersebut yaitu metode common effect, metode fixed effect, dan metode random effect. Ketiga metode tersebut akan diuji dan dicari model yang paling tepat untuk menjelaskan hasil analisis dari penelitian ini. Uji yang digunakan dalam pemilihan model tersebut yaitu uji chow (uji F), uji LM, dan uji hausman. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat analisis Eviews 10.

4.1 Deskriptif Data

Deskriptif data dalam penelitian ini menjelaskan rata-rata, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel yang digunakan untuk Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

Tabel 4.4 Statistik deskriptif

Kabupaten/ Kota	Statistik Deskriptif	PM (Y)	IPM (X1)	RLS (X2)	TPT (X4)	UMK (X4)
				11.29	5.926	
	Mean	34.22	84.5444	44	3	1,509,658
Kota	Maximum	37.8	86.65	11.45	7.41	1,848,400
Yogyakarta	Minimum	29.45	82.72	10.88	4.8	1,173,300
		106.0		10.3	4.7633	
	Mean	35	81.429	26	3	1,345,017
Kabupaten	Maximum	118.2	83.85	7	7.17	1,701,000
Sleman	Minimum	90.17	79.69	9.97	3.28	1,026,181
		85.62		9.42	2.7755	
	Mean	1	71.425	4	6	1,272,894
Kabupaten				11.4		
Kulon	Maximum	93.2	74.44	4	4.18	1,613,200
Progo	Minimum	74.62	68.83	7.85	1.49	954,339

Tabel 4.3 Statistik deskriptif (lanjutan)

Kabupaten/ Kota	Statistik	PM (Y)	IPM (X1)	RLS (X2)	TPT (X4)	UMK (X5)
Kabupaten Bantul	Mean	148.4	77.566	8.88	3.24	1,315,313
	Maximum	160.1	80.01	9.54	5.24	1,649,800
	Minimum	131.1	75.31	8.34	2.39	993,484
	Mean	144.3	67.122	6.42	2.1655	1,234,630
Kabupaten Gunung Kidul	Maximum	157.8	69.96	7.13	4.04	1,571,000
	Minimum	123.0	64.2	5.59	1.38	947,114
	Mean	519.1	77.74	8.92	6.0	1,170,250.8
	Maximum	568.0	79.99	9.38	7.41	1,570,923
DIY	Minimum	448.4	75.77	8.51	4.8	892,600

Sumber : Hasil olah excel, 2020

Berdasarkan hasil tabel analisis statistik deskriptif di atas, Kota Yogyakarta memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2010 yaitu dengan jumlah penduduk miskin 37.8 ribu jiwa, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010 nilai indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta masih rendah sementara tingkat pengangguran terbuka tinggi yaitu sebesar 7.41% pada tahun 2010. Untuk nilai minimum penduduk miskin di Kota Yogyakarta berada di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 akses pendidikan dan kesehatan sudah bertambah, hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya nilai IPM dan RLS serta rendahnya nilai tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019. Selanjutnya standar upah yang diterapkan pada tahun 2019 di Kota Yogyakarta sudah cukup tinggi yaitu Rp 1,848,400 yang berarti pendapatan para buruh di Kota Yogyakarta meningkat pada tahun 2019.

Kabupaten Sleman memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin 118.2 ribu jiwa, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 masih terkena dampak adanya fenomena Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, kerugian terbesar akibat fenomena tersebut di Kabupaten Sleman yaitu kerugian yang berasal dari perkebunan salak pondoh yang mengalami kerugian hingga 200 miliar. Untuk pemulihan kembali perkebunan salak pondoh membutuhkan waktu yang lama, untuk panen salak pondoh bisa mencapai 3 tahun setelah dilakukan penanaman bibit. Untuk nilai minimum penduduk miskin Kabupaten Sleman berada di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman sudah dipenuhi dengan pusat perbelanjaan berupa supermarket dan mall, selanjutnya

banyaknya jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Sleman juga mendorong perekonomian di Kabupaten Sleman seperti meningkatnya jumlah kos-kosan dan meningkatnya jumlah cafe di sekitar kampus. Selanjutnya nilai indeks pembangunan manusia tinggi dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman tinggi. Selanjutnya standar upah pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman sudah cukup tinggi yaitu Rp 1,701,000. Sehingga pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Sleman rendah.

Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2012 yaitu dengan jumlah penduduk miskin 93.2 ribu jiwa, hal tersebut dikarenakan unsur penyebab kemiskinan masih tinggi seperti perumahan yang belum layak, kesehatan rendah, sandang yang masih kurang, pendapatan masih rendah, serta tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah. Untuk nilai minimum penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo berada di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kemudahan akses pendidikan, kesehatan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat setempat yang merupakan dampak dari pembangunan Yogyakarta International Airports (YIA) dan masyarakat mendapatkan ganti rugi tanah, ganti rugi tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah yang lebih layak serta membangun usaha di sekitar bandara, selain itu pariwisata di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perbaikan di setiap tahunnya sehingga menarik wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya nilai ipm dan rls serta. Standar upah minimum pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo juga tinggi yaitu Rp 1,613,200.

Kabupaten Bantul memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2015, hal tersebut dikarenakan terdapat kejadian gempa bumi di Kabupaten Bantul, menurut BPBD Kabupaten Bantul, gempa bumi tahun 2006 menyebabkan 4,143 jiwa meninggal, 71.763 rumah mengalami kerusakan total dan 71,372 rumah mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian harta benda seperti usaha yang terdampak terdapat kerajinan keramik di Kasongan yang hancur, kerugian akibat adanya bencana gempa bumi tersebut terjadi jangka panjang karena untuk rekonstruksi kembali atau pemulihan kondisi seperti semula membutuhkan waktu dengan jangka panjang ditambah pada tahun 2015 jumlah orang yang tidak bekerja pada usia kerja (15 tahun – 59 tahun) sebanyak 57,615 orang, sehingga ketika dalam suatu daerah memiliki banyak penduduk usia kerja yang tidak bekerja maka kemiskinan akan meningkat karena ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka seseorang tersebut tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk nilai minimum penduduk miskin Kabupaten Bantul berada di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat pembangunan infrastruktur berupa jalan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, hal tersebut berdampak pada tingginya nilai ipm dan rls pada tahun 2019 serta pariwisata di Kabupaten Bantul sudah mulai berkembang pada tahun 2019 sehingga pendapatan masyarakat setempat meningkat. Standar upah minimum Kabupaten Bantul pada tahun 2019 juga sudah cukup tinggi yaitu Rp 1,649,800

Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2012, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 unsur penyebab kemiskinan masih tinggi seperti perumahan yang belum layak, kesehatan rendah, sandang yang masih kurang, pendapatan masih rendah, serta tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah, hal tersebut juga menyebabkan angka bunuh diri Kabupaten Gunungkidul tinggi pada tahun 2012. Untuk nilai minimum penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat peningkatan akses kesehatan seperti pembangunan RSUD Saptosari, sehingga nilai indeks pembangunan manusia tinggi pada tahun 2019. Selanjutnya nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul juga meningkat di tahun 2019 yaitu 7.13 tahun, upah minimum Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan yaitu Rp 1,571,000. Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) paling tinggi di Kabupaten/Kota DIY yaitu pada tahun 2019 hanya 7.13 atau setara dengan SMP, hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Gunungkidul memiliki minat untuk sekolah yang rendah, masyarakat di pedesaan Gunungkidul lebih cenderung memiliki mencari rezeki di daerah kota (merantau). Selanjutnya, masyarakat yang memiliki jenjang sekolah tinggi dan bersekolah di kota serta hidup di kost maka nilai rata-rata sekolah (RLS) yang dihitung yaitu di wilayah kota tempat ia menempuh pendidikan (domisili kost) sehingga hal tersebut menyebabkan nilai RLS Kabupaten Gunungkidul rendah.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai maksimum penduduk miskin pada tahun 2010, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010 terdapat fenomena Gunung Merapi meletus yang menyebabkan masyarakat kehilangan ternak, rumah, serta pekerjaan. Selanjutnya menurut Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Badan Litbang dan Inovasi (2013) terdapat 2445 ekor ternak yang mati akibat erupsi merapi atau setara dengan Rp 149 miliar, pada sektor pertanian terdapat kerugian Rp 247 miliar, kerugian paling parah yaitu pada salak pondoh yaitu rugi hingga 200 miliar. Pada sektor perikanan terjadi kerugian sebesar 1,272 ton, selain hal tersebut terdapat fenomena gempa bumi 2006 yang mengalami kerugian besar dan berdampak jangka panjang, sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka yang tinggi. Untuk nilai minimum jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan sudah meningkatnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, dan meningkatnya pariwisata serta rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Pada tahun 2019 upah minimum yang ditetapkan pada Kabupaten/Kota DI Yogyakarta sudah cukup tinggi, sehingga penghasilan para pekerja meningkat.

Rata-rata penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bantul sementara rata-rata penduduk miskin terendah berada di Kota Yogyakarta, rata-rata indeks pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta sementara rata-rata indeks pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata RLS

tertinggi berada di Kota Yogyakarta sementara rata-rata RLS terendah berada di Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berada di Kota Yogyakarta sementara rata-rata tingkat pengangguran terbuka paling rendah berada di Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata UMK paling tinggi berada di Kota Yogyakarta sementara rata-rata UMK paling rendah berada di Kabupaten Gunungkidul. Kota Yogyakarta memiliki rata-rata tertinggi dalam hal indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, upah minimum regional sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki rata-rata terendah untuk penduduk miskin. Namun Kota Yogyakarta juga memiliki nilai rata-rata tertinggi untuk tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan pusat kota di DI Yogyakarta serta akses pendidikan dan akses kesehatan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sehingga nilai IPM dan RLS paling tinggi di Kota Yogyakarta, selanjutnya karena Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian maka upah minimum kabupaten yang ditawarkan juga paling tinggi. Namun tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta tinggi karena tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh pengangguran terdidik, yaitu masyarakat dengan lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan di bidangnya atau masyarakat yang lulus dari perguruan tinggi namun tidak memiliki skill yang dapat digunakan untuk bekerja sehingga tingkat pengangguran terbuka tinggi. Selanjutnya, Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi dikarenakan di Kabupaten Bantul terdapat kecamatan termiskin yaitu Kecamatan Sedayu yang mayoritas masyarakatnya sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan

pertanian, sehingga pendapatan masyarakat disana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata nilai indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan UMK yang paling rendah dikarenakan di Kabupaten Gunungkidul sendiri untuk akses kesehatan dan akses pendidikan terbatas, serta memiliki UMK yang rendah karena untuk biaya hidup di Kabupaten Gunungkidul juga rendah. Namun Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah karena masyarakat Kabupaten Gunungkidul mayoritas setelah lulus dari sekolah dasar (SD) atau lulus dari sekolah menengah pertama (SMP) langsung merantau untuk bekerja di luar daerah tanpa memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang

Rata-rata penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta 519.1 ribu jiwa, apabila dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta, rata-rata penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta masih dibawah rata-rata DIY. Rata-rata indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 77.74%, apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masih memiliki rata-rata IPM dibawah rata-rata IPM DIY yaitu dengan rata-rata IPM secara berturut-turut yaitu 71.425%, 77.566%, dan 67.122%, sementara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki rata-rata IPM di atas rata-rata IPM DIY yaitu dengan rata-rata IPM secara berturut-turut 84.544% dan 81.429%. Rata-rata RLS Daerah Istimewa Yogyakarta 8.924%, apabila dibandingkan dengan rata-rata RLS

Kabupaten/Kota DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata RLS di bawah rata-rata RLS DIY yaitu secara berturut-turut 8.885 tahun dan 6.428 tahun sementara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata RLS di atas rata-rata RLS DIY yaitu secara berturut-turut 11.2944 tahun, 10.326 tahun, dan 9.424 tahun. Rata-rata TPT di Daerah Istimewa Yogyakarta 6.0%, apabila dibandingkan dengan rata-rata TPT di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki rata-rata TPT di atas rata-rata TPT DIY yaitu 7.41%. Rata-rata UMP Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 1,170,250.8. Rata-rata UMK Kabupaten/Kota DI Yogyakarta berada di atas rata-rata UMP DIY karena penetapan UMK didasarkan pada UMP sehingga nilai UMK lebih tinggi dari UMP.

4.2 Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Hasil regresi data panel ketiga model

Tabel 5.4 Hasil regresi data panel dengan model common effect, fixed effect, dan random effect

Variabel independen	Model Common Effect		Model Fixed Effect		Model Random Effect	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	9.568717	0.0887*	14.97614	0.000 0***	9.568717	0.000 0***
LOG (IPM)	0.314389	0.8356	- 1.901125	0.050 8*	0.314389	0.038 6**
Variabel independen	Model Common Effect Coeff.	Prob.	Model Effect Coeff.	Fixed Prob.	Model Effect Coeff.	Random Prob.

LOG	-	0.1091	-	0.138	-	0.000
(TPT)	0.314039		0.030499	0	0.314039	0***
LOG	-	0.4170	-	0.005	-	0.000
(UMK)	0.222388		0.196652	7***	0.222388	0***
R ²	0.479747		0.995455		0.479747	
Ajusted R ²	0.433502		0.994568		0.433502	
Prob (F- statistic)	0.000005		0.000000		0.000005	

Catatan : * = signifikan pada alpha 10%, ** = signifikan pada alpha 5%, ***

= signifikan pada alpha 1%.

4.2.2 Pemilihan model yang tepat

4.2.2.1 Uji chow

Uji chow digunakan untuk memilih antara model common effect dengan model fixed effect.

H₀ = Tidak ada perbedaan dalam intercept (Model common effect)

H_a = Terdapat perbedaan dalam intercept (Model fixed effect)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. < α (0.10) maka menolak H₀, artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. < α (0.10) maka gagal menolak H₀, artinya model common effect yang tepat.

Tabel 4.6 Hasil uji chow Eviews 10

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	1163.0515		
Cross-section F	06	(4,41)	0.0000
	237.01495		
Cross-section Chi-square	7	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data eviews 10

Didapatkan nilai Prob. Cross-section F $0.0000 < \alpha (0.10)$ maka menolak H_0 . Artinya terdapat perbedaan intercept dalam model atau dengan kata lain model yang tepat adalah model fixed effect.

4.2.2.2 Uji Hausman

Berdasarkan hasil dari uji chow bahwa model yang tepat merupakan model fixed effect, maka langkah selanjutnya yaitu memilih antara model random effect dengan model fixed effect menggunakan uji hausman.

H_0 = Model random effect

H_a = Model fixed effect

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. $< \alpha (0.10)$ maka menolak H_0 , artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila

nilai Prob. < α (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model random effect yang tepat.

Tabel 4.7 hasil uji hausman Eviews 10

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	4652.20602		
Cross-section random	3	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data Eviews 10, 2020

Didapatkan nilai Prob. Cross-section random $0.0000 < \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 . Artinya model yang tepat yaitu model fixed effect.

4.2.3 Uji statistik dengan Model Fixed effect

$$\ln PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln IP_{it} + \beta_2 \ln RLS_{it} + \beta_3 \ln TPT_{it} + \beta_4 \ln UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

4.2.3.1 Hasil regresi Model Fixed Effect

Tabel 4.8 Hasil regresi data panel model fixed effect

Variabel Independen	Coefficient	Prob.
C	14.97614	0.0000***
LOG(IPM)	-1.901125	0.0508*
LOG(RLS)	0.254277	0.0113**

LOG(TPT)	-0.030499	0.1380
LOG(UMK)	-0.196652	0.0057***

Tabel

4.7

Hasil regresi data panel model fixed effect (lanjutan)

R ²	0.995455
Adjusted R ²	0.994568
Prob (F-statistic)	0.000000
<i>Cross-section effect dari model estimasi fixed effect</i>	
Kota Yogyakarta	-0.819190
Kabupaten Sleman	0.244062
Kabupaten Kulon Progo	-0.212765
Kabupaten Bantul	0.515134
Kabupaten Gunungkidul	0.272759

Catatan : * = signifikan pada alpha 10%, ** = signifikan pada alpha 5%,

*** = signifikan pada alpha 1%.

4.2.3.2 Koefisien determinasi (R²)

Didapatkan nilai R² sebesar 0.995455, artinya sebesar 99.54% variasi dalam model menjelaskan variabel penduduk miskin (PM) dan sisanya 0.46% variabel penduduk miskin (PM) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.3.3 Uji parsial (Uji T)

Dalam penelitian ini menggunakan alpha (α) atau tingkat kesalahan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%.

1. Pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap PM (Penduduk Miskin)
Didapatkan nilai koefisien regresi -1.90112 dan Prob. $0.0508 < \alpha$ (0.10) maka artinya IPM memiliki pengaruh negatif signifikan pada alpha 10% terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.
2. Pengaruh RLS (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap PM (Penduduk Miskin)
Didapatkan nilai koefisien regresi 0.254277 dan Prob. $0.113 < \alpha$ (0.10) maka artinya RLS memiliki pengaruh positif signifikan pada alpha 5% terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.
3. Pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap PM (Penduduk Miskin)
Didapatkan nilai koefisien regresi -0.030499 dan Prob. $0.1380 > \alpha$ (0.10) maka artinya TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.
4. Pengaruh UMK (Upah Minimum Kabupaten) terhadap PM (Penduduk Miskin)
Didapatkan nilai koefisien regresi -0.196652 dan Prob. $0.0057 < \alpha$ (0.10) maka artinya UMK memiliki pengaruh negatif signifikan pada alpha 1% terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

4.2.3.4 Uji bersama-sama (Uji F)

Dalam penelitian ini menggunakan alpha (α) atau tingkat kesalahan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%. Didapatkan nilai Prob (F-statistic) $0.000000 < \alpha$ (0.10) maka artinya IPM, RLS, TPT dan UMK secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

4.2.4 Pembahasan

Pembahasan membahas analisis ekonomi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta dengan mengacu pada hasil uji statistik yang menggunakan estimasi model *fixed effect*.

4.2.4.1 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil uji statistik yang menggunakan estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta dengan koefisien regresi -1.90112. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika IPM naik 1% maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta akan mengalami penurunan sebesar 1.90112%. Dan sebaliknya, apabila IPM turun 1% maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta akan mengalami peningkatan sebesar 1.90112%. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori pada penelitian ini yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kelayakan hidup

berupa terpenuhinya kebutuhan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran. Sehingga ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan serta mendapatkan kehidupan yang layak maka seseorang tersebut masuk dalam kategori yang hidup sejahtera. Namun ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tidak mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan serta tidak mendapatkan kehidupan yang layak maka seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin. Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu oleh Priyadi dan Asmoro (2011) dan Susanti (2013) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hasil estimasi dalam penelitian ini berbeda dengan hasil estimasi penelitian terdahulu oleh Syaifullah dan Malik (2017) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

4.2.4.2 RLS (Rata-rata Lama Sekolah) Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil uji statistik yang menggunakan estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta dengan koefisien regresi 0.254277. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika rata-rata lama sekolah naik 1% maka kemiskinan akan naik 0.254277% dan sebaliknya ketika rata-rata lama sekolah turun 1% maka kemiskinan akan turun 0.254277%. Hasil estimasi dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dalam teori menyatakan bahwa ketika rata-rata lama sekolah meningkat maka

kemiskinan akan menurun dan sebaliknya ketika rata-rata lama sekolah menurun maka kemiskinan akan meningkat. Namun dalam hasil penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, hal tersebut dikarenakan bahwa tidak semua yang memiliki rata-rata sekolah tinggi merupakan orang yang mampu, wajib belajar yang ditetapkan pemerintah saat ini yaitu 12 tahun. DI Yogyakarta memiliki penduduk dengan profesi sebagai petani sebesar 615.377 ribu penduduk. Petani tidak selalu mendapatkan hasil panen yang tetap, selain itu hasil panen yang diperoleh tidak semua dijual hampir sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sehingga pendapatan yang diperoleh seorang petani tidak menetap. Ketika memiliki pendapatan yang tidak tetap dan harus berkewajiban menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang tinggi maka biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya harus terpotong dengan biaya sekolah anak hal tersebut mengurangi kesejahteraan dan berdampak kepada kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan teori biaya peluang. Menurut Mankiw (2006) biaya peluang merupakan sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Sehingga dalam hal ini, seseorang memilih menggunakan pendapatan untuk biaya pendidikan dengan mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Di Indonesia sendiri sudah terdapat kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yaitu usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Namun berdasarkan hasil survey *Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)* yang bekerjasama dengan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* di DI Yogyakarta kebijakan ini belum tepat sasaran, dalam survei ini ditemukan pemegang kartu KIP

yang berasal dari keluarga mampu yaitu keluarga dengan penghasilan Rp5.000.000/bulan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, penerima kartu KIP terdapat 13.884 dan IDEA mengambil sampel 82 penerima kartu KIP. Berdasarkan survei tersebut terdapat 14.7% di DI Yogyakarta yang menerima kartu KIP namun tidak masuk dalam kategori miskin. Sehingga dengan adanya program wajib belajar 12 tahun dengan kebijakan bantuan dana pendidikan yang belum tepat sasaran menyebabkan rata-rata lama sekolah meningkatkan kemiskinan di DI Yogyakarta. Hasil estimasi penelitian ini berbeda dengan hasil estimasi dari penelitian terdahulu oleh Qurratu'ain Q.A dan Ratnasari (2016) ; Manoppo J.J.E, Engka D.S.M, dan Tumangkung S.Y.L (2018) dan Jacobus E.H, Kindangen, Walengko E.N (2018) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.2.4.3 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Hal tersebut berbeda dengan teori yang ada. Dalam teori menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta karena

berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh sakernas (survei angkatan kerja nasional) DI Yogyakarta pada tahun 2018, mengatakan bahwa sebagian besar pengangguran di Yogyakarta adalah pengangguran terdidik dengan pendidikan minimal SMA ke atas. Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan hasil survei sakernas dalam BPS DIY (2018) paling banyak didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 29,11% sementara untuk lulusan perguruan tinggi hanya 16,95%. Hal tersebut dikarenakan untuk masyarakat lulusan SD lebih bekerja secara fleksibel yaitu bekerja pada bidang apa saja sementara untuk masyarakat lulusan perguruan tinggi bekerja berdasarkan jenis pekerjaan apakah sesuai dengan bidangnya atau tidak. Sehingga tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi DIY karena pengangguran tersebut didominasi oleh pengangguran terdidik yang baru saja lulus dalam menempuh pendidikan. Masyarakat yang baru saja lulus dalam menempuh pendidikan dan belum memiliki pekerjaan untuk biaya hidup dimungkinkan masih ditanggung oleh orangtuanya, sehingga tingkat pengangguran terbuka berasal dari keluarga yang mampu sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hasil estimasi dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu dari Zuhdiyati (2017), Giovanni (2018), dan Purbosiwi (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hasil estimasi dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu dari Susanti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

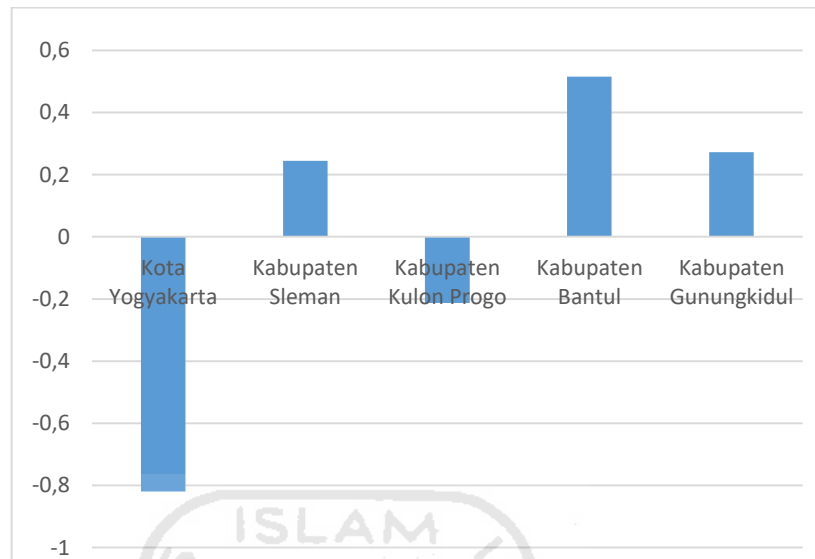
4.2.4.4 UMK (Upah Minimum Kabupaten) dan Jumlah Penduduk Miskin di

Kabupaten/Kota DI Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji statistik dengan estimasi model fixed effect dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta dengan koefisien regresi -0.196652 . Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika upah minimum kabupaten naik 1% maka kemiskinan akan turun 0.196652% dan sebaliknya ketika upah minimum kabupaten turun 1% maka kemiskinan akan naik 0.196652% . Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada yaitu dalam teori menyebutkan bahwa semakin tinggi upah yang didapatkan maka kemiskinan akan menurun. Ketika upah minimumnya kabupaten yang diterapkan tinggi, maka pendapatan para pekerja akan meningkat dan berdampak kepada meningkatnya konsumsi. Konsumsi yang meningkat ini mencerminkan bahwa seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga upah minimum regional yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan. Hasil estimasi dalam penelitian ini sama dengan hasil estimasi penelitian terdahulu oleh Kuniawati, Gunawan B.T, dan Indrasari D.P.T (2017) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

4.2.5 Analisis kemiskinan antar Kabupaten/Kota DI Yogyakarta

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model fixed effect didapatkan nilai cross section setiap Kabupaten/Kota DI Yogyakarta sebagai berikut:



Gambar 4.10 Intercept Kabupaten/Kota DIY

Berdasarkan grafik di atas kemiskinan terendah berada di Kota Yogyakarta dan kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah karena Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian di DI Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan sangatlah mudah bagi masyarakat Kota Yogyakarta, selain hal tersebut standar upah yang diterapkan di Kota Yogyakarta juga paling tinggi di antara Kabupaten/Kota DI Yogyakarta lainnya, hal ini berarti bahwa pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta juga tinggi. Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi karena di Kabupaten Bantul terdapat Kecamatan termiskin di DI Yogyakarta, yaitu Kecamatan Sedayu dengan mayoritas pekerjaan merupakan petani yang tidak memiliki lahan, sehingga masyarakat hanya mempekerjakan lahan untuk pertanian dan mendapatkan upah atau mendapatkan sebagian dari hasil pertanian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk miskin paling tinggi di Kota Yogyakarta pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin paling tinggi di Kabupaten Sleman pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin paling tinggi di Kabupaten Bantul pada tahun 2015, dan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012, sementara jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi DIY secara keseluruhan pada tahun 2010.
2. Jumlah penduduk miskin paling rendah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Provinsi DIY secara keseluruhan pada tahun 2019.
3. Rata-rata jumlah penduduk miskin paling tinggi berada di Kabupaten Bantul dan rata-rata jumlah penduduk miskin paling rendah berada di Kota Yogyakarta.
4. Jumlah penduduk miskin secara simultan dipengaruhi oleh variabel indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum kabupaten (UMK).
5. Jumlah penduduk miskin secara parsial dipengaruhi negatif oleh besaran indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti ketika IPM naik maka kemiskinan

turun dan ketika IPM turun maka kemiskinan naik. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang akan memengaruhi kemiskinan yang ada.

6. Jumlah penduduk miskin secara parsial dipengaruhi positif oleh besaran rata-rata lama sekolah (RLS). Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah maka jumlah penduduk miskin meningkat, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat DIY merupakan seorang petani yang memiliki penghasilan tidak tetap, penghasilan tidak tetap tersebut harus digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan dengan cara memotong biaya pemenuhan hidup seperti pangan, papan, dan sandang sehingga kesejahteraan berkurang, ditambah dengan adanya kebijakan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di DI Yogyakarta masih kurang tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin yang memenuhi kewajiban program wajib belajar 12 tahun masih terbebani dengan biaya pendidikan yang ada.
7. Jumlah penduduk miskin secara parsial tidak dipengaruhi oleh besaran tingkat pengangguran terbuka (TPT). hal ini dikarenakan pengangguran tertinggi di Yogyakarta berasal dari pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi yang baru saja lulus dari pendidikannya dan pengangguran terdidik ini berasal dari keluarga yang mampu.
8. Jumlah penduduk miskin secara parsial dipengaruhi negatif oleh besaran upah minimum kabupaten (UMK). Hal ini berarti ketika UMK naik maka kemiskinan turun dan ketika UMK turun maka kemiskinan naik. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh seseorang akan memengaruhi kemiskinan yang ada.

9. Jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Yogyakarta sementara jumlah penduduk miskin tertinggi Kabupaten Bantul.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia berupa kebijakan mempermudah akses kesehatan dan pendidikan terutama di kabupaten-kabupaten yang masih memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang rendah. Misalnya dengan pembangunan puskesmas di setiap kecamatan dan pembangunan sekolah di setiap kecamatan.
2. Dana bantuan pendidikan perlu ditingkatkan pengawasannya agar penyalurannya lebih tepat sasaran, sehingga bantuan tersebut hanya didapatkan oleh masyarakat yang tergolong miskin untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus dari sekolah.
3. Untuk mengurangi banyaknya pengangguran terdidik di DI Yogyakarta, dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan skill mahasiswa untuk bersiap masuk pasar kerja, misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pra kerja.
4. Kebijakan penerapan standar upah perlu memperhatikan kebutuhan buruh, karena dengan adanya peningkatan standar upah minimum dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

5. Dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi seperti pariwisata, kuliner, dan kerajinan yang ada di Kabupaten Bantul.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2016. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Badan Litbang dan Inovasi. 2013. Restorasi Ekosistem : Gunung Merapi Pasca Erupsi. Diakses pada tanggal 12 November 2020. Dapat diakses di <https://www.fordamof.org>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020. Dapat diakses di <http://bappeda.jogjaprov.go.id>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2020. Rata-Rata Lama Sekolah. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020. Dapat diakses di <http://bappeda.jogjaprov.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Sleman. 2017. Banyaknya Dosen, Mahasiswa, Lulusan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Dapat diakses di slemankab.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Sleman. 2017. Banyaknya Dosen, Mahasiswa, Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Kedinasan di Kabupaten Sleman. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Dapat diakses di slemankab.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019. D.I. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jumlah Penduduk Miskin, 2009-2019*. D.I. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pembangunan Manusia*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020. Dapat diakses di <https://ipm.bps.go.id/> .
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*. D.I. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kot (Persen), 2010-2019*. D.I. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi (Rupiah), 2012-2020*. D.I. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.

- BPBD Kabupaten Bantul. 2014. *Sejarah Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul*. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Dapat diakses di bpd.bantulkab.go.id.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Giovianni, R. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7 (1) (2013) ISSN 2252-6965.
- Hakim, A. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : EKONISIA.
- IDEA. 2016. Siswa-Siswi Bantul Kritisi Program Kartu Indonesia Pintar. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Dapat diakses di <http://perkumpulanidea.or.id>.
- Ihsan, H. Fuad. 2006. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jacobus, E.H., Kindangen, Paulus dan Walewangko, E.N. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.7.2018.
- K. Sitepu, Rasidin, dan Bonar, M. 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Indonesia : Pendekatan Model*.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kuncoro, M. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan Edisi ke-5*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kurniawati, A., Gunawan, B.T., dan Indrasari, D.P.R. 2017. Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2006-2014. *Journal of Research in Economics and Management*, Volume 17, No. 2, Juli-Desember (Semester II) 2017, Halaman 233-252.
- Mankiw, G.N. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi ke-4. Imam Nurmawan [penerjemah]. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, G.N. 2006. *Principles of Economics : Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi ke-3. Chriswan Sungkono [penerjemah]. Jakarta : Salemba Empat.
- Manoppo, J.J.E., Engka D.S.M., dan Tumangkung S.Y.L. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 18 No. 02 Tahun 2018.
- Mubyarto. 2005. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES
- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.
- Priyadi, U. dan Asmoro, J. 2011. Analisis Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Regional di Indonesia. *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 75 Juli 2011.
- Purbosiwi, R. 2016. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal PKS*, Vol 15 No. 2 Juni 2016 ; 89-100.
- Qurratu'ain, Q.A. dan Ratnasari, V. 2016. Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni ITS*,.....
- Rustam (2010). *Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran Dan Kemiskinan*, 6(1).
- Sartika, C. et al. 2016. No Title., 1 April, pp.106-118.
- Simanjuntak, Payaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFEUI.
- Sriyana, J. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sudono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sudono. 2005. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, T. 2000. *Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan*. Bandung : Humaniora.
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah.
- Susanti, S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, Vol.9 No.1, April 2013 pp. 1-18.
- Syaifullah, A. dan Malik, N. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1 Jilid 1/2017 Hal. 107-119.
- Teddy Christanto. 2013. Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Riau Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN : 1978 – 3612.

Todaro, Michael. P .2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7. Haris Munandar [penerjemah]. Jakarta : Erlangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Wongdesmiwati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004 : Analisis Ekonometrika*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Zuhdiyaty, Noor. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (JIBEKA)*, Volume 11 Nomor 2 Februari 2017, 27-31.

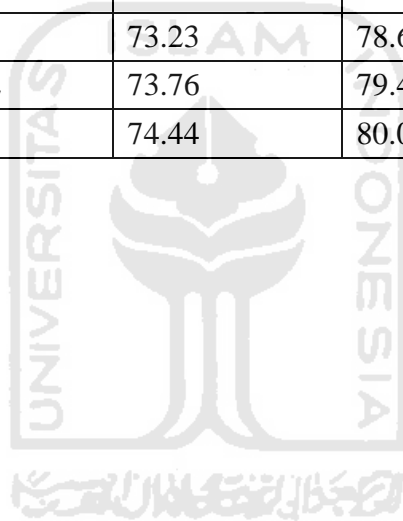


Lampiran I Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota DIY (Ribuk Jiwa)

	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul
2010	37.8	117	90.1	146.9	148.7
2011	37.74	117.32	92.76	159.38	157.09
2012	37.4	118.2	93.2	159.2	157.8
2013	35.62	110.84	86.5	156.61	152.38
2014	35.6	110.44	84.67	153.49	148.39
2015	35.98	110.96	88.13	160.15	155
2016	32.06	96.63	84.34	142.76	139.15
2017	32.2	96.75	84.17	139.67	135.74
2018	29.75	92.04	77.72	134.84	125.76
2019	29.45	90.17	74.62	131.15	123.08

Lampiran II IPM menurut Kabupaten/Kota DIY (Persen)

	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul
2010	82.72	79.69	68.83	75.31	64.2
2011	82.98	80.04	69.53	75.79	64.83
2012	83.29	80.1	69.74	76.13	65.69
2013	83.61	80.26	70.14	76.78	66.31
2014	83.78	80.73	70.68	77.11	67.03
2015	84.56	81.2	71.52	77.99	67.41
2016	85.32	82.15	72.38	78.42	67.82
2017	85.49	82.85	73.23	78.67	68.73
2018	86.11	83.42	73.76	79.45	69.24
2019	86.65	83.85	74.44	80.01	69.96

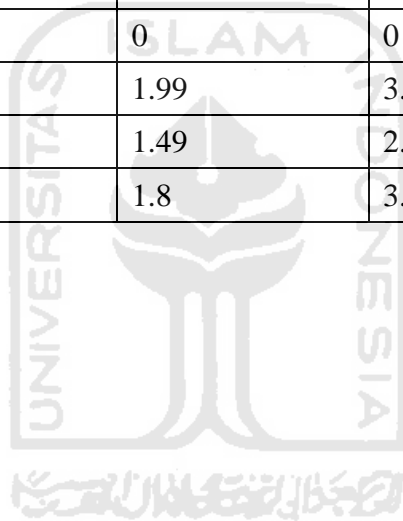


Lampiran III RLS menurut Kabupaten/Kota DIY (Tahun)

	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul
2010	10.88	9.97	7.85	8.34	5.59
2011	11.01	10.03	7.88	8.35	5.74
2012	11.22	10.03	7.93	8.44	6.08
2013	11.36	10.03	8.02	8.72	6.22
2014	11.39	10.28	8.2	8.74	6.45
2015	11.41	10.3	11.41	9.08	6.46
2016	11.42	10.64	11.42	9.09	6.62
2017	11.43	10.65	11.43	9.2	6.99
2018	11.44	10.66	11.44	9.35	7
2019	11.45	10.67	8.66	9.54	7.13

Lampiran IV TPT menurut Kabupaten/Kota DIY (Persen)

	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul
2010	7.41	7.17	4.18	5.24	4.04
2011	6.7	5.36	3.03	2.39	2.23
2012	5.33	5.64	3.04	3.7	1.38
2013	6.45	3.28	2.85	3.36	1.69
2014	6.35	4.21	2.88	2.57	1.61
2015	5.52	5.37	3.72	3	2.9
2016	0	0	0	0	0
2017	5.08	3.51	1.99	3.12	1.65
2018	6.22	4.4	1.49	2.72	2.07
2019	4.8	3.93	1.8	3.06	1.92



Lampiran V UMK menurut Kabupaten/Kota DIY (Rupiah/bulan)

	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	1,065,247	1,026,181	954,339	993,484	947,114
2014	1,173,300	1,127,000	1,069,000	1,125,500	988,500
2015	1,302,500	1,200,000	1,138,000	1,163,800	1,108,249
2016	1,452,400	1,338,000	1,268,870	1,297,700	1,235,700
2017	1,572,200	1,448,385	1,373,600	1,404,760	1,337,650
2018	1,709,150	1,574,550	1,493,250	1,572,150	1,454,200
2019	1,848,400	1,701,000	1,613,200	1,649,800	1,571,000

Lampiran VI Jumlah penduduk miskin, IPM, RLS, TPT, dan UMP menurut Provinsi

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	IPM (Persen)	RLS (Tahun)	TPT (Persen)	UMP (Rupiah)
2010	540.5	75.77	8.51	7.41	745,700
2011	568.05	76.32	8.53	6.7	808,000
2012	565.73	76.75	8.63	5.33	892,660
2013	541.95	77.37	8.72	6.45	947,114
2014	532.5	76.81	8.84	5.35	988,500
2015	550.22	77.59	9	6.52	988,500
2016	494.94	78.38	9.12	0	1,182,510
2017	488.530	78.89	9.19	5.08	1,337,645
2018	460.110	79.53	9.32	6.22	1,454,154
2019	448.470	79.99	9.38	4.8	1,570,923

DIY

Lampiran VII Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	1163.05150		
Cross-section F	6	(4,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	237.014957	4	0.0000



Lampiran VIII Hasil uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4652.20602 3	4	0.0000



Lampiran IX Hasil regresi data panel Model Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(PM)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/13/20 Time: 19:28				
Sample: 2010 2019				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.97614	3.156334	4.744792	0.0000
LOG(IPM)	-1.901125	0.945004	-2.011763	0.0508
LOG(RLS)	0.254277	0.095792	2.654464	0.0113
LOG(TPT)	-0.030499	0.020161	-1.512765	0.1380
LOG(UMK)	-0.196652	0.067402	-2.917598	0.0057
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.995455	Mean dependent var	4.521032	
Adjusted R-squared	0.994568	S.D. dependent var	0.546500	
S.E. of regression	0.040277	Akaike info criterion	-3.424506	
Sum squared resid	0.066513	Schwarz criterion	-3.080342	
Log likelihood	94.61265	Hannan-Quinn criter.	-3.293446	
F-statistic	1122.500	Durbin-Watson stat	1.311632	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran X Nilai intercept Kabupaten/Kota DIY

NO	Kabupaten/Kota	Intercept
1	Kota Yogyakarta	-0.819190
2	Kabupaten Sleman	0.244062
3	Kabupaten Kulon Progo	-0.212765
4	Kabupaten Bantul	0.515134
5	Kabupaten Gunungkidul	0.272759

